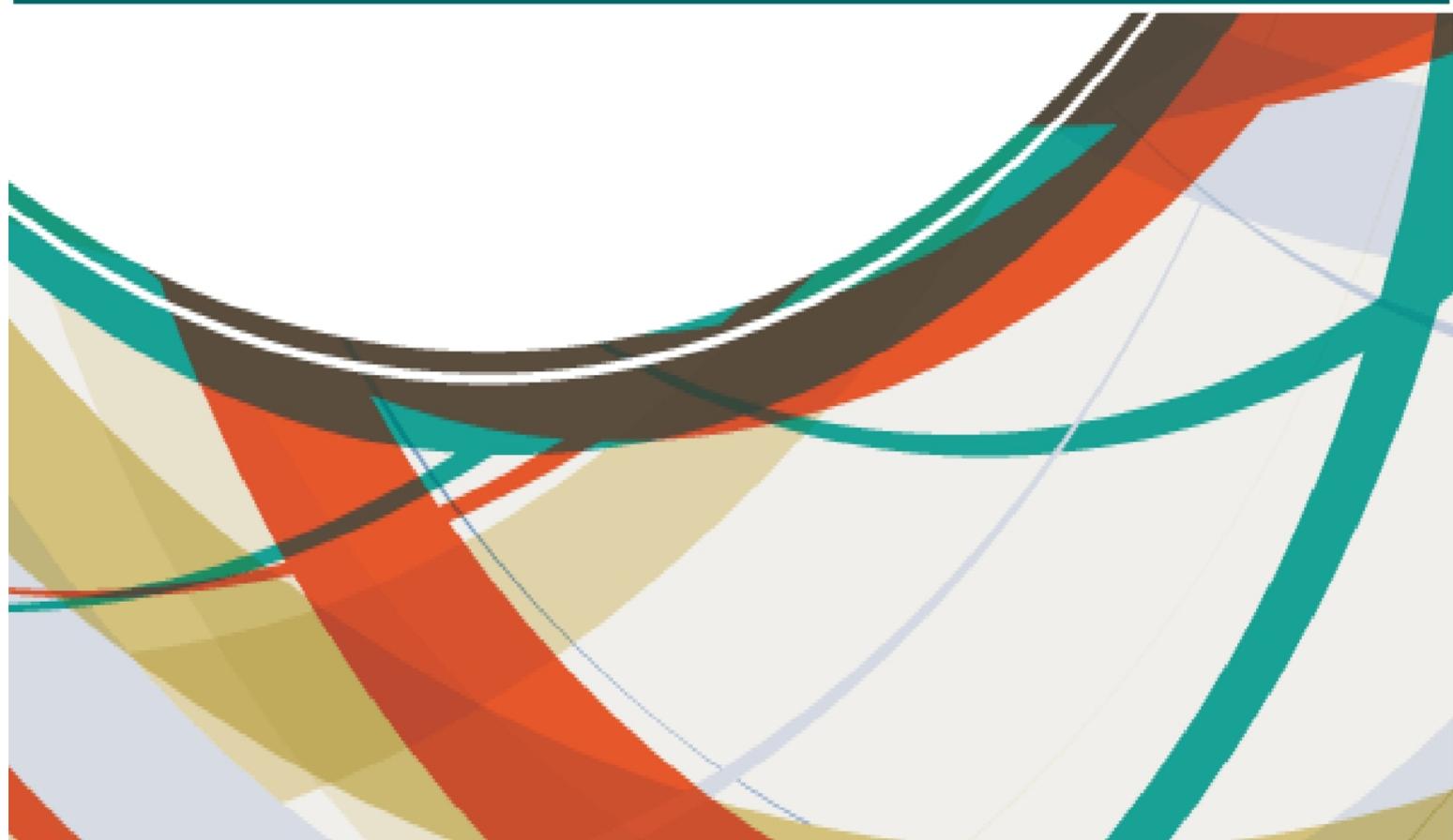




LAPORAN KINERJA | 2022 KABUPATEN BONDOWOSO



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 dapat selesai dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 ini melaporkan capaian kinerja Bupati Drs. KH. SALWA ARIFIN periode tahun 2018-2023, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan diukur sesuai sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Bondowoso Tahun 2021, yang merupakan pelaksanaan dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang dijabarkan menjadi target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta partisipasi aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2022.

Bondowoso, 25 Maret 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

B

erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, maka pelaksanaan kinerja dilaporkan dan diukur berdasarkan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, yang merupakan pelaksanaan dari target kinerja RPJMD Tahun 2018 - 2023 dan target kinerja tahunan dalam RKPD Tahun 2022.

Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Diharapkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap laporan ini dijadikan sebagai motivasi untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, manajemen keuangan maupun pengawasannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun pencapaian sasaran strategis yang berupa indikator kinerja utama (IKU) untuk mewujudkan 5 (lima) Misi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut :

- Misi 1:** Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 140,86% dengan kategori **memuaskan**.
- Misi 2:** Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 101,16% atau kategori **memuaskan**.

- Misi 3:** Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 68,38% dengan kategori **cukup berhasil**.
- Misi 4:** Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 98,51% dengan kategori **sangat berhasil**.
- Misi 5:** Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 80,84% dengan kategori **berhasil**.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah menjadi suatu komponen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik selaras dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai semua elemen masyarakat, utamanya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sejarah Kabupaten Bondowoso

1.4 Gambaran Umum Daerah

1.5 Kondisi Ekonomi Daerah

1.6 Reformasi Birokrasi

1.7 Profil Sumberdaya Aparatur

1.8 Isu Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana capaian

kinerja dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan laporan kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dalam mencapai sasaran strategis, dan menyampaikannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah : memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3 Sejarah Kabupaten Bondowoso

Sejarah berdirinya Bondowoso merupakan rangkaian peristiwa panjang yang dimulai dari pengembangan wilayah kekuasaan Besuki ke arah selatan pada Tahun 1789 oleh Menteri Anom Abhiseka Mas Astruno. Pada Tahun 1794 dalam usaha memperluas wilayah beliau menemukan suatu wilayah yang sangat strategis untuk kemudian disebut Bondowoso dengan diangkatnya beliau sebagai demang di daerah yang baru dengan

nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno atau yang biasa dikenal dengan Raden Bagus Assra.



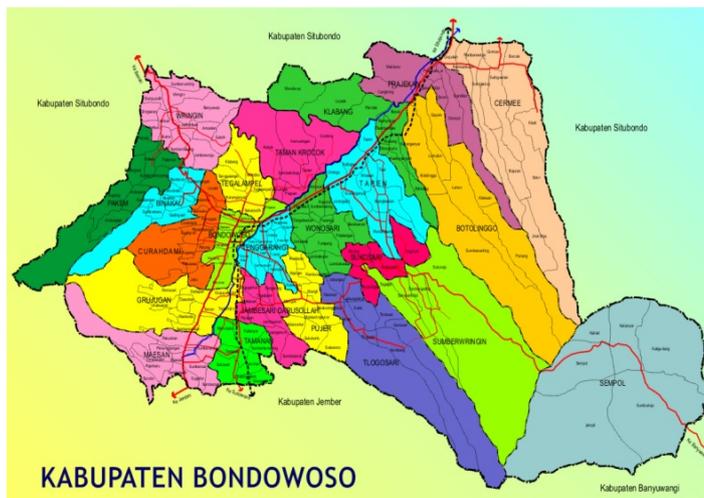
Gambar 1.1. Monumen Gerbong Maut Bondowoso

Perkembangan Bondowoso dari hari ke hari semakin meningkat dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau hari Selasa Kliwon tanggal 25 Syawal 1234 H, Adipati Besuki R. Aryo Prawirodiningrat sebagai orang yang memperoleh kepercayaan dari Gubernur Hindia Belanda, dalam rangka memantapkan strategi politiknya menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I, ditandai penyerahan Tombak Tunggul Wulung.

1.4 Gambaran Umum Daerah

1.4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Bondowoso yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS berada di antara pegunungan, yaitu : Pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen di sebelah timur dan Pegunungan Hyang dengan puncaknya Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.



Letak Kabupaten Bondowoso kurang strategis meskipun berada di tengah, namun tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi dan tidak memiliki lautan. Wilayah Kabupaten Bondowoso

berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain, yaitu sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah selatan Kabupaten Jember, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Wilayah geografis Kabupaten Bondowoso berada pada $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $1.560,10 \text{ km}^2$ atau 3,26% dari total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh:

- 1) Bagian utara : Kabupaten Situbondo.
- 2) Bagian selatan : Kabupaten Jember.
- 3) Bagian timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
- 4) Bagian barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

a. Fisik Geografis

Kabupaten Bondowoso berada diantara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen di sebelah timur dan pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat

Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Letak Kabupaten Bondowoso yang berada diantara pegunungan tersebut, menjadikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Bondowoso didominasi oleh daerah dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4% dan dataran tinggi seluas 24,9%. Sedangkan dataran rendah hanya seluas 30,7% dari luas wilayah keseluruhan.

Pola aliran sungai di Kabupaten Bondowoso terbentuk akibat pengaruh kondisi wilayah yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada yaitu DAS Sampean dengan aliran sungai meliputi Sungai Sampean yang membelah wilayah Kabupaten Bondowoso, DAS Deluwang yang meliputi Sungai Deluwang di sisi barat dan DAS Banyuputih (Kalipahit) yang meliputi Sungai Telaga di sisi timur.

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebagian besar didominasi jenis tanah regosol yang mencapai 782,87 km² (50,18%) dan tanah andosol mencapai luas 328,59 km² (21,06%). Tanah regosol merupakan jenis tanah yang berasal dari material gunung berapi, sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Sedangkan tanah andosol merupakan tanah yang berasal dari abu gunung berapi terdapat di lereng gunung api, tanah jenis ini cocok untuk tanaman hutan hujan tropis, bambu, dan rumput.

Tabel 1. 1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
1	Maesan	Maesan	-	12	62	13	5.608,30
2	Grujugan	Taman	-	11	49	7	7.44,70
3	Tamanan	Taman	-	9	52	15	2.815,10
4	Jambesari DS	Jambesari	-	9	41	10	3.010,50
5	Pujer	Kejayan	-	11	80	12	3.988,90
6	Tlogosari	Pakistan	-	10	98	17	11.091,70
7	Sukosari	Sukosari Lor	-	4	31	22	2.317,27
8	Sbr. Wringin	Sbr. Wringin	-	6	71	27	13.794,73
9	Tapen	Tapen	-	9	52	16	5.704,20
10	Wonosari	Wonosari	-	12	72	10	4.227,20
11	Tenggarang	Tenggarang	1	11	69	2	2.579,50
12	Bondowos	Dabasah	7	4	19	2	2.315,80

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
13	Curahdami	Curahdami	1	11	111	3	5.028,59
14	Binakal	Binakal	-	8	51	7	3.903,91
15	Pakem	Patemon	-	8	47	18	6.208,20
16	Wringin	Wringin	-	13	92	16	5.801,00
17	Tegalampel	Sekarputih	1	7	54	2	3.702,75
18	Taman Krocok	Taman	-	7	47	12	5.300,35
19	Klabang	Klabang	-	11	49	19	9.120,40
20	Botolinggo	Lumutan	-	8	100	25	12.741,45
21	Ijen	Sempol	-	6	38	74	20.720,00
22	Prajejan	Prajejan Lor	-	7	34	24	5.664,55
23	Cermee	Cermee	-	15	93	32	12.920,40
JUMLAH			10	209	1.412	385	156.010,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Kab. Bondowoso, 2023

Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.412 dusun dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Bondowoso.

b. Topografi Wilayah

Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian antara 73 - 3.287 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian \pm 253 meter dpl. Wilayah tertinggi berada pada ketinggian 3.287 meter dpl, tepatnya di puncak Gunung Raung yang masuk wilayah Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, sedangkan dataran terendah berada pada ketinggian 73 meter dpl tepatnya di Desa Grujugan Kecamatan Cermee.

Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Datar dengan kemiringan 0° - 2° seluas 190,83 km² (12,23%), landai 2° - 15° seluas 568,17 km² (36,42%), agak curam 15° - 40° seluas 304,70 km²(19,53%) dan sangat curam diatas 40° seluas 496,40 km² (31,82%).

c. Iklim dan Cuaca

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang sejuk berkisar 17°C hingga 32°C dengan suhu rata-rata $24,7^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 62% hingga 90%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari posisi geografis wilayah yang berada diantara pegunungan Kendeng Utara dengan puncak Gunung Raung dan Gunung Ijen di sebelah timur serta kaki

pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Bondowoso sebesar 1.394 mm³/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 76 hari/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 430 mm³ dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,1 mm³.

d. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Bondowoso 90,08% digunakan untuk pertanian yaitu persawahan, tanah kering, perkebunan, kehutanan, rawa dan tambak. Sedangkan sisanya sebesar 7,25% digunakan untuk pemukiman, industri, padang rumput, pertambangan, lahan yang sementara tidak digunakan dan lainnya. Bila dirinci menurut penggunaannya, lahan terluas digunakan untuk kehutanan yaitu sebesar 35,77%. Selanjutnya adalah tegalan/tanah kering 27,66% dan persawahan 20,74%. Sedangkan yang digunakan untuk pemukiman sekitar 4,69%. Lahan terkecil digunakan untuk industri di bawah 1,00%.

1.4.2 Kondisi Demografi

a. Kependudukan

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
di Kabupaten Bondowoso, 2022

Kecamatan Subdistrict	Jeni Kelamin Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maesan	23 995	24 366	48 361
Grujugan	18 644	18 896	37 540
Tamanan	19 211	19 637	38 848
Jambesari Darus Sholah	18 060	18 379	36 439
Pujer	19 838	20 779	40 167
Tlogosari	22 718	23 161	45 879
Sukosari	7583	7998	15 581
Sumber Wringin	16 900	17 649	34 369
Tapen	16 424	17 691	34 115

Kecamatan Subdistrict	Jeni Kelamin Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Wonosari	19 550	20 326	39 876
Tenggarang	21 192	21 858	43 050
Bondowoso	37 868	39 395	77 263
Curahdami	19 709	16 671	33 380
Binakal	8555	8801	17 356
Pakem	11 501	11 884	23 385
Wringin	19 741	20 327	40 068
Tegalampel	13 318	13 091	26 409
Taman Krocok	8109	8639	16 748
Klabang	8890	9426	18 316
Ijen	6076	5908	11 984
Botolinggo	14 850	15 210	30 060
Prajejan	12 488	13 097	25 585
Cermee	22 456	23 732	46 188
Bondowoso	384 676	396 741	781 417

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri, 2023

Penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2022 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim sebanyak 781.417 jiwa yang terdiri atas 384.676 jiwa penduduk laki-laki dan 396.741 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Bondowoso mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,37 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,0 yang artinya diantara 100 perempuan terdapat 97 orang laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bondowoso tahun 2022 mencapai 515 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 23 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bondowoso dengan sebesar 3.383 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Ijen sebesar 56 jiwa/km²

1.5 Kondisi Ekonomi Daerah

1.5.1 Potensi Unggulan

Pembangunan perekonomian daerah yang sedang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pengembangan ekonomi daerah dengan harapan

dapat membangun dan mengembangkan potensi ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi.

Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa potensi unggulan yang cukup potensial untuk dikembangkan, antara lain :

a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bondowoso, hal ini terbukti dengan adanya beberapa wilayahnya berhasil memproduksi pertanian padi organik yang memiliki sertifikasi internasional.



Gambar 1.3. Padi Siap Panen di Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan data sementara BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2019, disebutkan bahwa sektor pertanian masih sebagai penyumbang terbesar pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso atas dasar harga berlaku tahun 2019 yang mencapai 32,40% dari total PDRB.

Adapun potensi unggulan yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian, antara lain yaitu :

- a) Tanaman bahan pangan dengan produksi utama adalah padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar dan palawija.
- b) Tanaman hortikultura atau komoditas sayur-sayuran meliputi cabe merah, cabe rawit, kentang, kubis dan tomat.

- c) Tanaman buah-buahan yang meliputi durian, mangga, alpukat, pisang, stroberi dan rambutan.
- d) Tanaman perkebunan meliputi kopi, tembakau, kelapa dan tebu.
- e) Tanaman kehutanan berupa pohon mahoni, jati, gamelina dan sengon.
- f) Peternakan meliputi sapi potong, kambing, domba, ayam kampung, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik.
- g) Perikanan air tawar berupa budidaya ikan air tawar seperti mujair, lele, nila.

Salah satu potensi tanaman perkebunan yang menonjol selain tembakau adalah kopi, karena produksi kopi di Kabupaten Bondowoso sangat bagus dan telah mampu merambah pasar ekspor, Kopi Arabica “Java Ijen Raung” Bondowoso telah diekspor ke sejumlah negara di Eropa dan Amerika, ekspor perdana sebesar 18 ton dilakukan tahun 2011 dan ekspor pada tahun 2017 mencapai 1.600 ton, dan pada tahun 2019 meskipun mengalami penurunan ekspor hanya 1.000 ton namun serapan pasar lokal meningkat mencapai 800 ton. Untuk memperluas lahan kopi nantinya dikembangkan pula kluster kopi di daerah Gunung Argopuro. Penghargaan terhadap kopi Bondowoso dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3. Penghargaan Terhadap Kopi Bondowoso

No	Tahun	Penghargaan
1	2012	Penghargaan KPDT Award Bidang Kebijakan Inovatif Kreatif
2	2013	Sertifikat Indikasi Geografis atas HAKI dari Kemenkumham
3	2014	Penghargaan Pro Poord Award dari Pemprov Jatim
4	2015	Juara 3 Festival Kopi Nusantara
5	2016	Juara 1 Festival Kopi Nusantara
6	2017	Kontes Kopi Spesialti Indonesia ke 9 (nilai tinggi 86,61)
7	2018	Coffee Festival and Cocoa 2019 (fasilitator terbaik tiga)

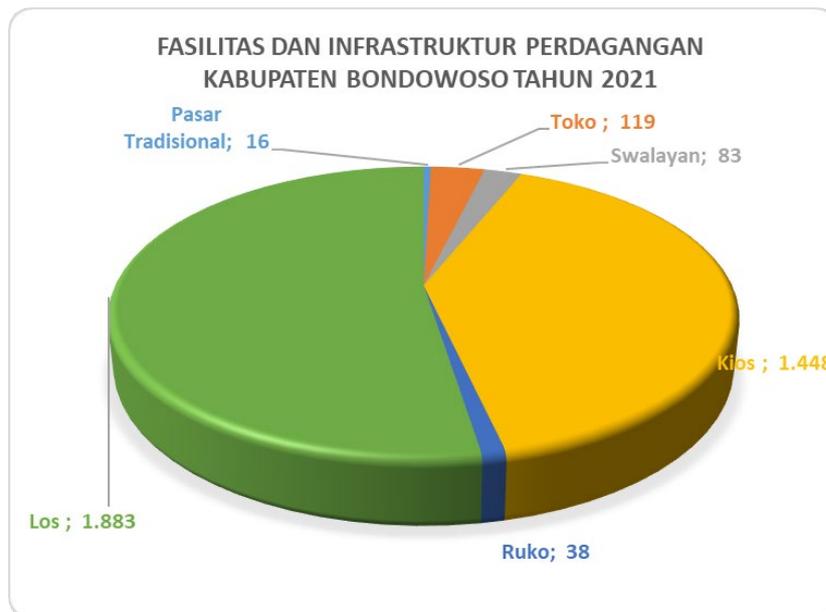
Sumber : KPW Bank Indonesia Jember, Tahun 2019

b. Sektor Perdagangan dan Jasa

Sektor Perdagangan dan jasa yang menunjang aktifitas perekonomian masyarakat adalah berkembangnya UMKM, pusat perdagangan dan jasa

seperti hotel dan restoran yang representatif, sarana perdagangan yang memadai seperti pasar daerah dan pasar desa, serta pengembangan tata ruang kawasan perdagangan, pertokoan dan perumahan.

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur Perdagangan Kabupaten Bondowoso tahun 2021 yang memadai, terdiri dari : Pasar Tradisional 16, Toko 119, Swalayan 83, Kios 1.448, Ruko 38 dan Los terdapat 1.883, sebagaimana gambar berikut :



Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Tahun 2021

Grafik 1.1 Fasilitas Perdagangan

c. Sektor Pariwisata



Gambar 1.4. Wisata Kawah Wurung

Wisata alam yang cukup menantang dari wisata air Arung Jeram Bosamba, yaitu dengan berolahraga rafting sambil menikmati pemandangan yang menarik, antara lain : Green Canyon ala Bosamba, Gua Kelelawar dan Simpang 6 Anak Sungai Sampean Baru, memerlukan waktu selama 2 jam perjalanan menyusuri aliran sungai sepanjang 14 km dan mengarungi 27 jeram besar maupun kecil.

Potensi pariwisata dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berbasis kreativitas masyarakat. Secara umum potensi pariwisata di Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu terdiri dari :

- a) **Potensi Alam** adalah potensi wisata yang dikembangkan karena keindahan, keunikan dan kelebihan dari alam, seperti : gunung raung, kawah ijen, kawah wurung, situs megalitikum, batu so'on solor, arung jeram bosamba, tancak kembar, air terjun gentongan, agrowisata kopi arabica dan petik strowberi, desa wisata organik, dll.
- b) **Potensi Kebudayaan** adalah potensi wisata yang merupakan hasil cipta rasa dan karsa, seperti : peninggalan prasejarah, pawai budaya, macapat, kesenian tradisional singo ulung, topeng konah, kentrung, tari ojung, tari pojien, dll.
- c) **Potensi Kreatif** adalah potensi yang dikembangkan oleh kreasi manusia melalui even-even yang menjadi daya tarik wisata seperti : festival muharram, festival kopi nusantara, jazz de ijen, ijen trail running, ijen night ride, paralayang ijen flying fest, fam trip travel media, festival lampion, dll.



Gambar 1.5. Atraksi Kesenian Tradisional Tari Pojian dan Singo Ulung

d. Sektor Perindustrian

Pembangunan sektor perindustrian diarahkan dengan mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) melalui kebijakan peningkatan kapasitas produksi memanfaatkan teknologi informasi dan berbasis sumberdaya lokal.

Potensi sektor perindustrian di Kabupaten Bondowoso didominasi oleh sentra industri kecil dan menengah (IKM) , antara lain :

- a) Industri tekstil seperti batik dan bordir.
- b) Industri makanan yang meliputi tape, tahu, tempe, kue, kerupuk dan keripik.
- c) Industri pengelolaan tembakau berupa industri rokok.
- d) Industri galian non-logam seperti batako, batu bata dan genteng.
- e) Industri barang kayu dan hasil hutan yang meliputi kerajinan meubeler, anyaman bambu dan rotan, serta pengolahan kayu sengon.
- f) Industri logam seperti kerajinan perhiasan dari kuningan dan pande besi.
- g) Industri lainnya seperti penggilingan gabah dan tepung.



Gambar 1.6. Kerajinan Kuningan di Desa Cindogo Kec.Tapen Kab. Bondowoso



Gambar 1.7. Industri Kecil Batik Tulis Sumber Sari Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso

Potensi batik khas Bondowoso makin berkembang, tidak saja dikagumi oleh pasar lokal namun juga banyak wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mendapatkannya. Beberapa brand yang sudah dikenal antara lain berlabel “*Batik Sumber Sari*” Kecamatan Maesan dan “*Batik Lumbung*” Kecamatan Tamanan.

e. Sektor Pertambangan

Pemenuhan akan kebutuhan energi listrik semakin hari semakin meningkat, hal ini mendorong pemerintah untuk menambah pembangkit listrik dengan tidak mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan. PT. Medco Cahaya Geothermal dengan pembangkit listrik energi panas bumi hadir di Kabupaten Bondowoso dengan solusi energi ramah lingkungan dan terbarukan.

Pertemuan antara Direktur Utama PT. MCG unit PLTPB Belawan Ijen dengan Bupati Bondowoso dilaksanakan jumat 20 Mei 2022 bersamaan dengan perayaan hari Kebangkitan Nasional. Dalam pertemuan ini juga membahas keberlanjutan kerjasama serta dampak yang ditimbulkan atas eksplorasi dan eksploitasi ini. Produksi listrik akan dimulai di tahun 2024

yang akan menghasilkan kurang lebih 110 MWatt dan akan mensuplay listrik Jawa Bali.



Gambar 1.8. Eksplorasi Geothermal di Desa Blawan Ijen

1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

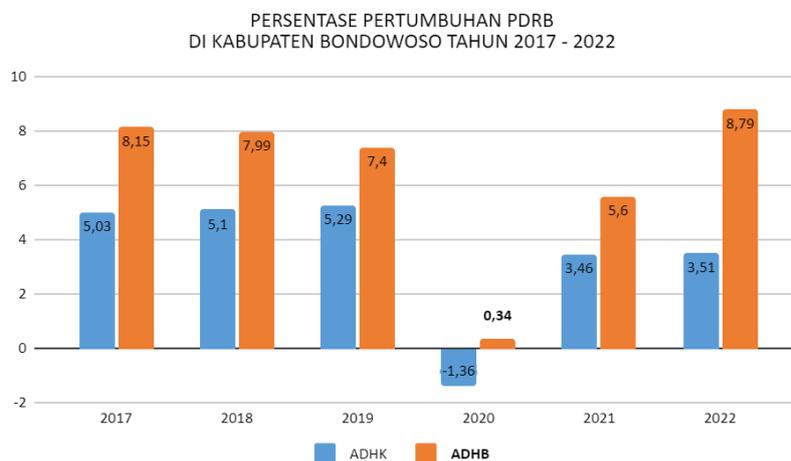
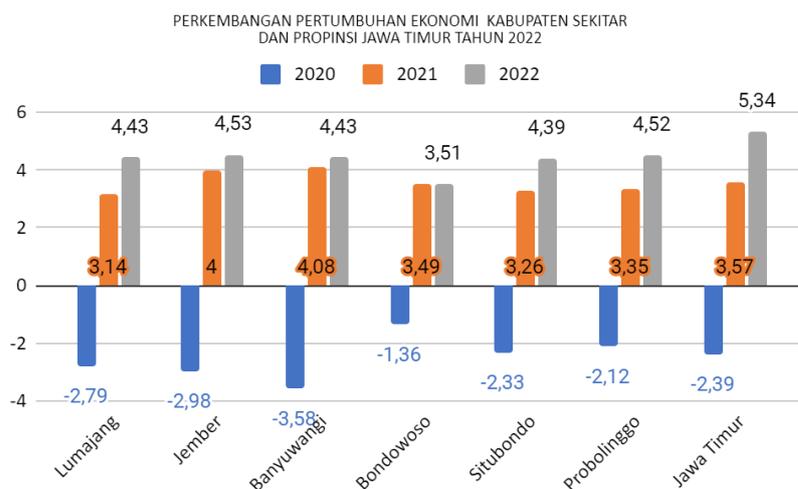
Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp.62,2 juta atau US\$.4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Angka ini merupakan usaha terbaik pemerintah setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal I dan pelambatan di kuartal III akibat meningkatnya angka infeksi Covid-19 di Tanah Air. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih dalam kisaran target pemerintah yaitu antara 3,5 persen sampai dengan 4,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Perbaikan angka pertumbuhan

ekonomi tahun 2021 didukung oleh perbaikan kinerja ekspor, kenaikan belanja fiskal pemerintah, dan peningkatan konsumsi dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh positif pada angka 3,57 persen setelah tahun 2020 mengalami kontraksi 2,33 persen. Pemulihan perekonomian Jawa Timur selama tahun 2021 didorong oleh adanya pelonggaran aktivitas sehingga meningkatkan permintaan dan konsumsi. Realisasi APBD Tahun 2021 meningkat pada belanja barang dan jasa (4,7%) serta belanja modal (35,3%). Belanja bantuan sosial naik 64% karena adanya realisasi bantuan penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.

Adanya peningkatan ekspor luar negeri Jawa Timur terutama pada ekspor barang, diantaranya adalah perhiasan, tembaga, kayu dan barang dari kayu, dan bahan kimia organik serta ditunjang peningkatan impor luar negeri memberikan sinyal atas perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tahun 2021. Selain itu seiring meningkatnya beberapa komoditi utama di Jawa Timur seperti mesin-mesin, besi dan baja, pupuk, plastik dan barang dari plastik dan sebagainya.

Perbaikan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur berimbas kepada perbaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso. Nilai total PDRB Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 mencapai Rp.21.052,23 milyar meningkat dari tahun 2020 yang mencapai Rp.19.935,59 Milyar. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua sektor ekonomi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi meningkat pada angka 3,49 persen pada tahun 2021 meskipun kondisi pandemi covid 19 masih berlangsung.



Grafik 1.2 Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu 3 tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi yang dikarenakan kondisi pandemi covid. Perekonomian Bondowoso tumbuh secara positif dari 5,30 persen pada tahun 2019 menurun mencapai angka -1,36 persen bertepatan dengan merebaknya virus corona pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 3,49 persen pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan fiscal serta dukungan pemerintah daerah.

Hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2021 diketahui sebesar 21.052,23 miliar rupiah dan PDRB Menurut harga konstan tahun 2021 sebesar 13.921,65 miliar rupiah

Tabel 1.4

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.802,12	5.946,49	6.204,93	3.682,96	3.729,46	3.818,35
2	Pertambangan dan Penggalian	388,31	373,69	388,06	269,79	252,97	257,49
3	Industri Pengolahan	4.630,56	4.762,09	5.140,41	3.224,57	3.235,13	3.358,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,47	8,59	9,01	6,78	6,78	6,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	13,77	14,50	15,68	10,91	11,35	12,06
6	Konstruksi	1.918,21	1.822,06	1.852,41	1.175,34	1.103,62	1.107,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	3.065,57	2.879,94	3.136,50	2.234,87	2.050,86	2.182,66
8	Transportasi dan Pergudangan	146,86	141,96	158,08	106,27	101,09	113,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,80	125,73	132,78	100,51	82,23	84,00
10	Informasi dan Komunikasi	1.023,25	1.110,70	1.188,01	899,76	974,90	1.041,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	573,74	575,49	596,56	396,98	395,12	399,27
12	Real Estat	226,83	238,22	243,67	168,73	173,40	175,91
13	Jasa Perusahaan	76,93	73,42	76,35	50,50	46,84	47,61
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	682,33	697,42	697,89	448,57	437,46	440,13

15	Jasa Pendidikan	693,87	724,71	741,71	505,75	518,54	529,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,45	156,88	167,71	107,66	116,62	121,78
17	Jasa Lainnya	323,76	283,69	302,49	250,52	215,39	224,39
	Jumlah	19.868,8 1	19.935,5 9	21.052,2 3	13.640,4 6	13.451,7 7	13.921,6 5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh menurut lapangan usaha di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan pandemic Covid-19, namun tidak semua kategori mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan 12,37 persen, pertumbuhan kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 6,85 persen sementara kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di urutan ketiga dengan 6,43 persen. Selanjutnya yang mengalami laju pertumbuhan terendah ditempati oleh lapangan usaha kategori konstruksi yang mencapai 0,38 persen, sektor kategori lain mengalami kenaikan dan penurunan cukup bervariasi.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019 – 2021

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3,15%	2,49%	4,35%	1,21%	1,26%	2,38%
2	Pertambangan dan Penggalian	4,93%	-3,76%	3,84%	2,44%	-6,24%	1,79%
3	Industri Pengolahan	10,94%	2,84%	7,94%	8,62%	0,33%	3,81%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,07%	1,37%	4,94%	5,83%	0,09%	2,34%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	6,47%	5,26%	8,16%	4,72%	3,96%	6,31%
6	Konstruksi	7,52%	-5,01%	1,67%	5,91%	-6,10%	0,38%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	9,05%	-6,06%	8,91%	6,33%	-8,23%	6,43%
8	Transportasi dan Pergudangan	10,84%	-3,33%	11,35%	8,31%	-4,87%	12,37%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,84%	-17,18%	5,61%	7,97%	-18,18%	2,15%

10	Informasi dan Komunikasi	9,06%	8,55%	6,96%	7,58%	8,35%	6,85%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,12%	0,31%	3,66%	3,97%	-0,47%	1,05%
12	Real Estat	7,73%	5,02%	2,29%	5,32%	2,77%	1,44%
13	Jasa Perusahaan	9,15%	-4,56%	3,99%	6,27%	-7,26%	1,65%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	10,96%	2,21%	0,07%	3,83%	-2,48%	0,61%
15	Jasa Pendidikan	9,48%	4,45%	2,35%	7,69%	2,53%	2,14%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06%	10,14%	6,90%	6,38%	8,32%	4,43%
17	Jasa Lainnya	7,56%	-12,37%	6,62%	6,44%	-14,02%	4,18%
	Jumlah	7,40%	0,34%	5,60%	5,29%	-1,36%	3,49%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, Semua kategori mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan 12,37 persen, pertumbuhan kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 6,85 persen sementara kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di urutan ketiga dengan 6,43 persen. Selanjutnya yang mengalami laju pertumbuhan terendah ditempati oleh lapangan usaha kategori konstruksi yang mencapai 0,38 persen, sektor kategori lain mengalami kenaikan dan penurunan cukup bervariasi.

1.5.3 PDRB perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.6
PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso
Tahun 2019 – 2021

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	ADHB (Rp)	25.614.000	25.685.198,89	27.041.170,20
2	ADHK (Rp)	17.585.000	17.331.383,39	20.305.031,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2021 sedangkan PDRB ADHK perkapita penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2021.

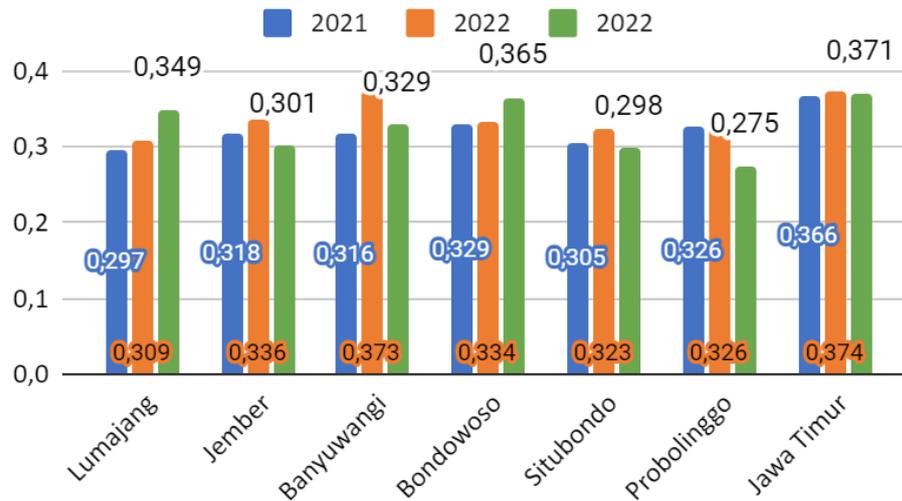
Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang mengalami kontraksi akan berpengaruh pada tingkat produksi dan distribusi komoditi yang ada pada sektor PDRB. Kondisi ini akan memberikan pengaruh kepada tingkat produksi pelaku usaha yang mengalami penurunan sehingga tingkat capaian PDRB per kapita akan menurun dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian PDRB per kapita masyarakat dan menyesuaikan target pencapaian PDRB per kapita untuk tahun berikutnya.

1.5.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin tinggi Indeks Gini, semakin besar pula ketimpangan yang ditunjukkan. Ini artinya, penduduk dengan income tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total income seluruh penduduk.

Indeks Gini Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2022 menunjukkan angka 0,365, ini masih lebih rendah dari Indeks Gini Propinsi Jawa Timur yang pada Tahun 2022 menunjukkan angka 0,371.

PERKEMBANGAN GINI RASIO KABUPATEN SEKITAR DAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022



Grafik1.3 Perkembangan Gini Rasio

Tabel 1.7

Indek Gini Kabupaten Bondowoso 2016-2021

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Gini Rasio	0,35	0,32	0,302	0,329	0,334

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio Gini (Gini Ratio) sepanjang tahun 2021 di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan menjadi 0,334 . Selama pandemi tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan khususnya pada lapisan bawah sehingga tingkat pengeluaran semakin kecil. Peningkatan angka rasio gini berkorelasi dengan peningkatan angka kemiskinan.

1.5.5 Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur darisisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.8
Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat kemiskinan	15,00	14,54	14,39	13,33	14,17	14,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Persentase kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang meningkat pada level 14,73% dengan adanya pandemic covid 19. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso bertambah sebanyak 4,93 ribu jiwa dari 110,24 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 115,18 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 4,47 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,95 persen, dari 14,17 persen pada Maret 2020 menjadi 14,73 persen pada Maret 2021.

1.5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Sakernas Agustus 2021, tingkat pengangguran penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso mencapai 4,46 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 73,89 persen. Meningkatnya pengangguran merupakan dampak nyata dari pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.9
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2021

No	Rincian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Usia Kerja	610.972	615.757	628.608	632.700
2	Angkatan Kerja	436.530	466.822	472.018	467.488
3	Bukan angkatan Kerja	174.442	148.935	156.590	165.212
4	Bekerja	419.497	453.025	452.545	446.653

No	Rincian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
5	Pengangguran Terbuka	17.033	13.797	19.473	20.835
6	Tingkat pengangguran Terbuka	3,90 %	2,96%	4,13%	4,46%
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		75,81%	75,09%	73,89%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Badan Pusat Statistik mencatat selama masa pandemi covid 19 terdapat sebanyak 29,12 juta penduduk Indonesia terdampak covid-19. Lebih dari 80 persen, mengalami pengurangan jam kerja dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional, per Agustus 2020.

Secara keseluruhan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 2,67 juta orang dalam setahun, menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,07 persen.

Jumlah pekerja formal semakin menyusut, paling banyak di sektor industri pengolahan dan konstruksi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian sehingga tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota, dibandingkan di desa.

Kondisi pandemi covid 19 juga berpengaruh kepada kondisi angka pengangguran di Bondowoso. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 meningkat menjadi 19.473 orang bertambah sebanyak 5.676 orang atau mengalami peningkatan 41,14% dari tahun 2019 yang mencapai 13.797 orang. Tingkat realisasi capaian kinerja TPT tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 16,23% dari target 1,91% terealisasi 4,13%.

Tabel 1.10
Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2021

No	Jenis Pekerjaan	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	Pertanian	193.673	125.555	218.713	204.486
2	Industri	73.168	49.096	91.676	87.302
3	Jasa	152.656	278.374	142.156	154.865
	Jumlah	419.497	453.025	452.545	446.653

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Selama kondisi pandemi covid 19, justru jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dan industri pengolahan (khususnya UMKM) mengalami penurunan namun kedua sektor ini masih menjadi penyumbang dalam penyediaan lapangan kerja. Sektor jasa yang mengalami penurunan terbesar jumlah tenaga kerja pada tahun 2020, mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu dari 142.156 orang menjadi 154.865 orang di tahun 2021. Hal ini menunjukkan intervensi program – program pembangunan pada sektor pertanian dan UMKM masih mampu memberikan peluang dan kesempatan kerja kepada masyarakat selama pandemi covid. Sedangkan pada sektor jasa, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak positif dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja pada sektor ini.

1.5.7 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2016-2021 terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.11
Perkembangan IPM Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indek pembangunan Manusia (IPM)	64,52	64,75	65,27	66,09	66,43	66,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pembangunan manusia di Kabupaten Bondowoso secara konsisten mengalami kemajuan selama periode 2019-2021. Dari 66,09 (2019) meningkat menjadi 66,59 (2021) atau selama periode tersebut tumbuh 0,24 persen.

Tabel 1.12
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	66,55 th	66,74 th	66,89 th
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,27 th	13,28 th	13,29 th
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	5,71 th	5,93 th	5,94 th
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.665,00	10.610,00	10.690,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Selama periode 2019 hingga 2020, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,74 tahun, meningkat 0,15 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,29 tahun, meningkat 0,01 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 5,94 tahun, juga meningkat 0,01 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2010) telah mencapai Rp.10,690 juta, meningkat Rp. 80 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

1.6 Reformasi Birokrasi

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023, tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi yang tertuang dalam misi 4 (empat), yaitu "***Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif***". Maksud dari misi ini adalah

mewujudkan kualitas pelayanan yang semakin baik terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa adanya pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan serta penyelenggaraan pemerintahan secara akuntabel, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan.

Berlandaskan pada misi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Komitmen dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2010 melaksanakan sebagian agenda program reformasi birokrasi melalui penerapan dan pengembangan berbagai sistem aplikasi untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.13. Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

No	Nama Sistem Aplikasi
1	Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)
2	Sistem Informasi Keuangan (SIMDA Keuangan Ver 29.08)
3	Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD)
4	Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG)
5	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
6	Sistem Informasi Rekam Dokumen (REDOK)
7	Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur (SIPIJAR)
8	Aplikasi Informasi Kedisiplinan ASN (SINKA)
9	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
10	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
11	Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Online (SIAPO)
12	Sistem Administrasi Informasi Desa (SAID)
13	Sistem Informasi Pengelolaan Karpeg, Pensiun, Karis, Karsu (KERIS)
14	Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian berbasis Paperless Digital (SITAPELEGIT)
15	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB (SISMIOP)
16	Sistem Informasi Manajemen BPHTB (E-BPHTB)

No	Nama Sistem Aplikasi
17	Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya (SIMPADA)
18	Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya (E-SPTPD)
19	Sistem Informasi Layanan Satu Peta (Satu Peta)
20	Sistem informasi penggunaan pupuk organik (ELABONIC)
21	Sistem Monitoring dan Tim Evaluasi Pengawasan Anggaran (SISMONTEPRA)
22	Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (JDIH)
23	Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIBUK)
24	Sistem Informasi Anjab dan ABK (SIAB)
25	Sistem Informasi Promosi Pariwisata Bondowoso (Web Promo)
26	Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Digital (TIC)
27	Sistem Informasi Majalah Digital Pariwisata Bondowoso (BWO Magazine)
28	Sistem Informasi Penerbitan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata Bondowoso (SIAP PAK)
29	Aplikasi SI PENDEKAR (SIPENDEKAR)
30	Sistem Informasi Barang Persediaan (SiBaper)
31	Sistem Informasi Gaji ASN (SIMGAJIWEB)
32	Sistem Informasi Pelaporan Gaji (SIKDCORE)
33	Sistem Informasi Dana Transfer Daerah (SIMTRADA)
34	Sistem Informasi Rekonsiliasi (SiRekon)
35	Sistem Informasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan (SIPNAKES)
36	Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)
37	Aplikasi Penyaluran Dana BOS (BOS Salur)
38	Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
39	Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (SIPINTAR)
40	Sistem Laporan Desa (SILAPDES)
41	Aplikasi Register Pindah Datang (REPINDAT)
42	Aplikasi Cek Data Penduduk (CEK DATA)
43	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
44	Sistem Informasi Ibu dan Bayi (SIBUBA)
45	Sistem Informasi Public Safety Center (PSC 119)
46	Sistem Informasi Bayi Dua Tahun (e-SIP Baduta)
47	Sistem Informasi Surat Keluar Masuk Berbasis Elektronik (e-Surat)
48	Aplikasi Pemesanan Aula (Aula Dinkes)
49	Sistem Informasi Persediaan Obat (SistemInformasiPersediaan)
50	Aplikasi SIPP
51	Aplikasi Sistem Monitoring Menara (SIMONA)
52	Aplikasi SISEDAP
53	Sistem Informasi Manajemen UMKM Daerah (SIMUDA)
54	Sistem Informasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
55	Sistem Informasi Evaluasi dan Monitoring Renja (e-Monev)
56	Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah SiPDJD
57	Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Nama Sistem Aplikasi
58	Aplikasi Petugas OP Irigasi untuk Pengelolaan Irigasi Modern dan Baik (e-Paksi)
59	Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso (SIKERJA)
60	Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan (SIMTendik)
61	Sistem Informasi Manajemen Uji Kompetensi Kepala Sekolah (SIM UKKS)
62	Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)
63	Sistem Pengelolaan Perpustakaan yang terintegrasi (INLIS)
64	Sistem Informasi Jejaring Pasar Rakyat SIJEPRAK)
65	Sistem Informasi Rekomendasi Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah (OSS)
66	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)
67	Aplikasi Laporan SPM (SPM)
68	Sistem Informasi Pendataan Asesmen Nasional (BIOUNSMP)
69	Sistem Informasi Pendataan Asesmen Nasional (BIOSD)
70	Sistem Informasi Pemetaan Satuan Pendidikan (ANBK)
71	Online Data System (ODS)
72	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generations (SIKS NG)
73	Sistem Informasi e-Program Keluarga Harapan (e-PKH)
74	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
75	Sistem Informasi Surat Menyurat (AMANAR)
76	Sistem Informasi Presensi Online (AbsensiOnline)
77	Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan (SI PERKASA)
78	Sistem Informasi Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba (GERDU BERSINAR)
79	Sistem Informasi Pengaduan Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba (Pelayanan Pengaduan Gerdu Bersinar)
80	Sistem Informasi Satpol PP (SIM-POLPP)
81	Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (SIP)
82	Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
83	Aplikasi Jabatan Fungsional (siJafung)
84	Aplikasi e-Absensi (e-Absensi)
85	Sistem Informasi Industri IKM (SI INDUS)
86	Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)
87	Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)

Sumber : *Arsitektur SPBE, tahun 2021*

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengembangkan pemanfaatan berbagai aplikasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri untuk mendukung kemudahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat 87 aplikasi yang eksisting dimana 57,5% (50 aplikasi) merupakan

domain aplikasi khusus yang terdapat pada Perangkat Daerah, dan 42,5% (37 aplikasi) merupakan domain aplikasi umum yang dapat digunakan di Perangkat Daerah. Untuk Sistem Operasi aplikasi sendiri, sebanyak 77,2% (78 aplikasi) merupakan sistem operasi windows, sebanyak 18,8% (19 aplikasi) merupakan sistem operasi Android, dan sistem operasi Linux sebanyak 4,0% (4 aplikasi)

Untuk platform aplikasi yang digunakan untuk saat ini adalah yang pertama platform web sebanyak 77,8% (77 aplikasi), dilanjut dengan platform mobile sebanyak 19,2% (19 aplikasi) dan yang ketiga adalah platform desktop dengan jumlah sebanyak 3,0% (3 Aplikasi). Untuk 62 Area Aplikasi penyesuaian dengan Standar Nasional, dimana 12.6% (11 Aplikasi) merupakan Aplikasi Layanan Publik, dilanjut 29.9% (26 Aplikasi) merupakan Aplikasi Administrasi Pemerintahan, dilanjut 5.7% (5 Aplikasi) merupakan Aplikasi Misi Tertentu, dan 51.7% (45 Aplikasi) merupakan Aplikasi Fungsi Tertentu di Perangkat Daerah.

Beberapa sistem aplikasi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso antara lain, sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) yang diaplikasikan sejak tahun 2012 dapat diakses melalui <http://lpse.bondowosokab.go.id/eproc>.



Gambar 1.9. LPSE Kabupaten Bondowoso

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga telah menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam rangka menertibkan dan meningkatkan pengawasan serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Sistem aplikasi SIMDA telah diterapkan secara online oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan seluruh PERANGKAT DAERAH, sehingga proses usulan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban realisasi anggaran dapat dilakukan secara online.



Gambar 1.10. SIMDA Keuangan Kabupaten Bondowoso

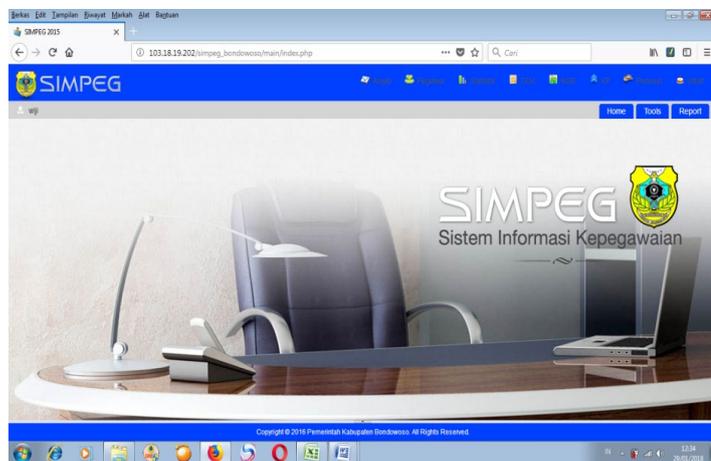


Gambar 1.11. SIMDA BMD Kabupaten Bondowoso

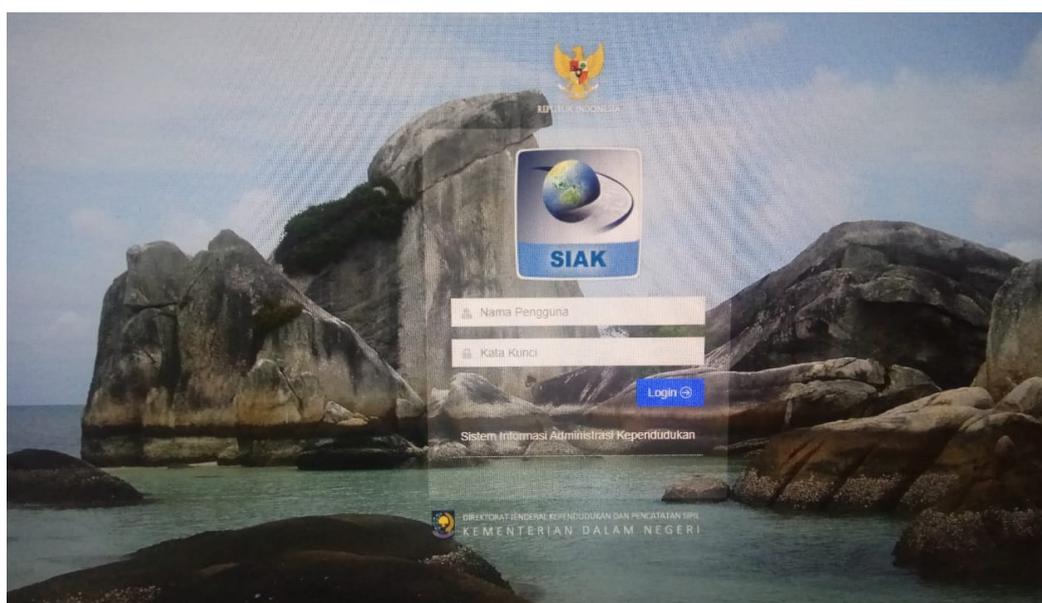
Penataan administrasi pengelolaan aset milik daerah, terus dilakukan melalui penerapan dan pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Aplikasi SIMDA BMD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset milik daerah, sehingga posisi aset daerah akan selalu update dalam neraca aset daerah. Selain itu,

aplikasi ini berguna untuk kontrol dan pengawasan terhadap semua aset milik daerah.

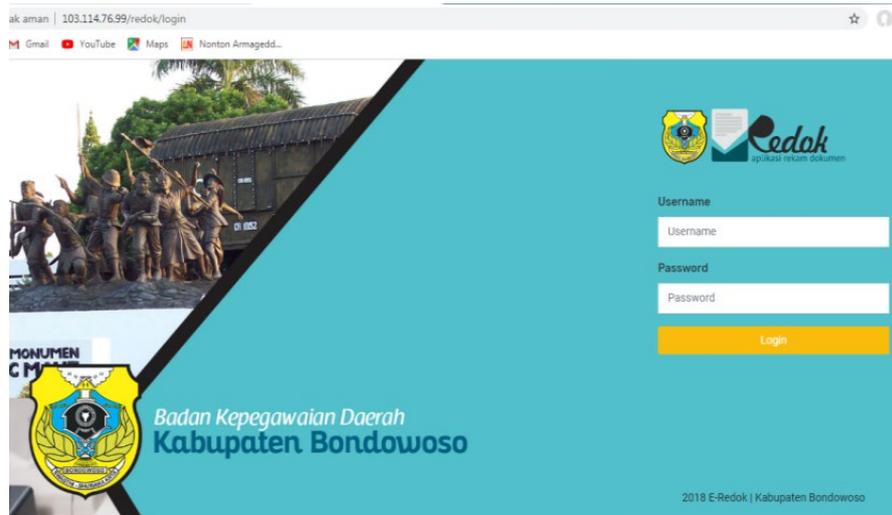
Aplikasi pendukung kinerja penyelenggaraan pelayanan yang lain adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dimaksudkan untuk membantu kelancaran administrasi kepegawaian dalam rangka pelayanan kepegawaian, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan proses pengelolaan administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan kependudukan.



Gambar 1.12. SIMPEG Kabupaten Bondowoso



Gambar 1.13. SIAM Kabupaten Bondowoso



Gambar 1.14. Redok Kabupaten Bondowoso

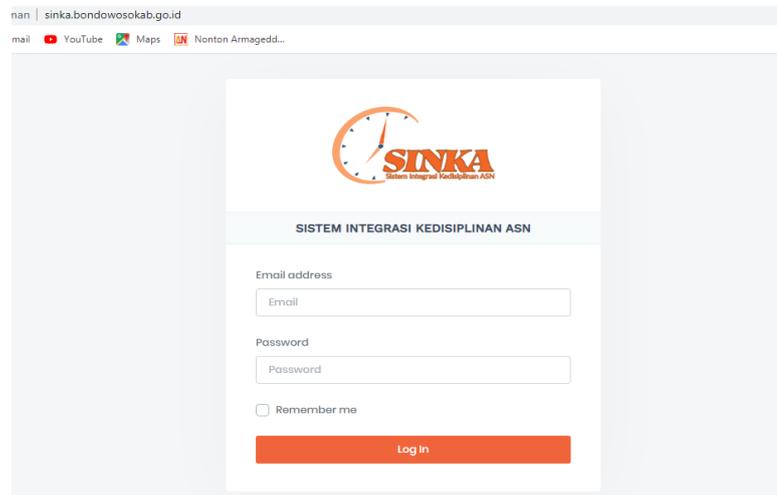
Layanan penyimpanan berkas kepegawaian secara online diimplementasikan dengan Aplikasi Rekam Dokumen (REDOK), hal ini bertujuan untuk memperlancar layanan kepegawaian dari BKD kepada Aparatur Sipil Negara.



Gambar 1.15. Si Pijar Kabupaten Bondowoso

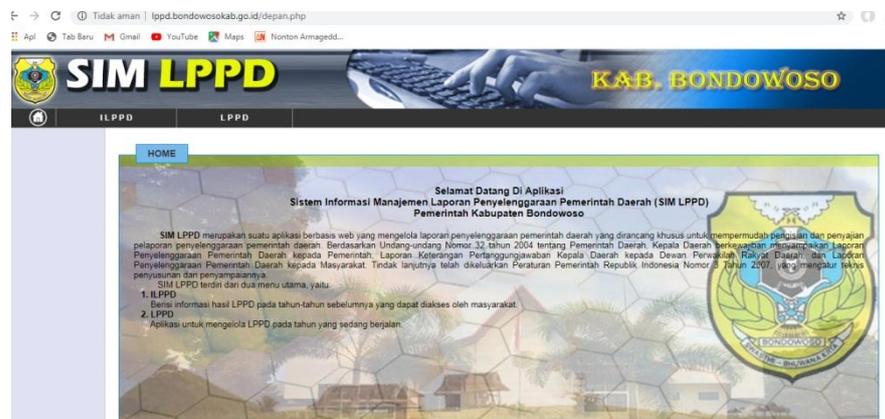
Implementasi E-Government diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Penerapan Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Aplikasi. Kabupaten Bondowoso meluncurkan aplikasi e-KINERJA (Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur) yang dapat Mengukur dan Menilai

Kinerja ASN secara Terpadu sehingga aktifitas dan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan tingkat Kinerjanya.



Gambar 1.16. SINKA Kabupaten Bondowoso

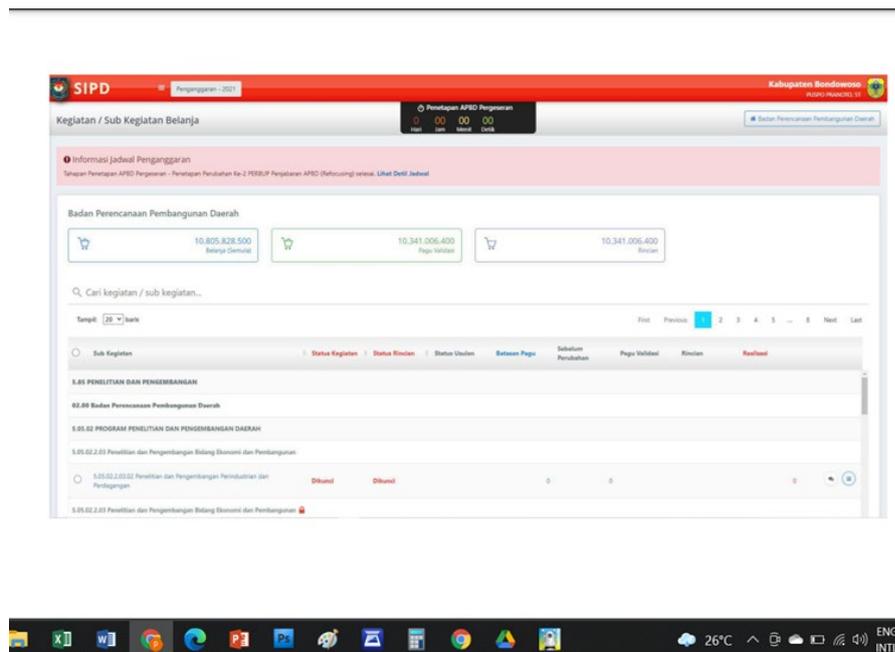
Upaya peningkatan kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Integrasi Kinerja ASN (SINKA) yang terintegrasi dengan absensi elektronik fingerprint dan iris mata. Aplikasi SINKA ini merupakan aplikasi pengelola TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai), yang telah terintegrasi dengan absensi elektronik, atau fingerprint yang ada di tiap-tiap Perangkat Daerah. Dengan aplikasi tersebut, absensi digital juga berfungsi untuk merekam tingkat keterlambatan ASN, beserta berapa potongan rupiah yang didendakan.



Gambar 1.17. SIM LPPD Kabupaten Bondowoso

Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) merupakan suatu aplikasi berbasis web yang

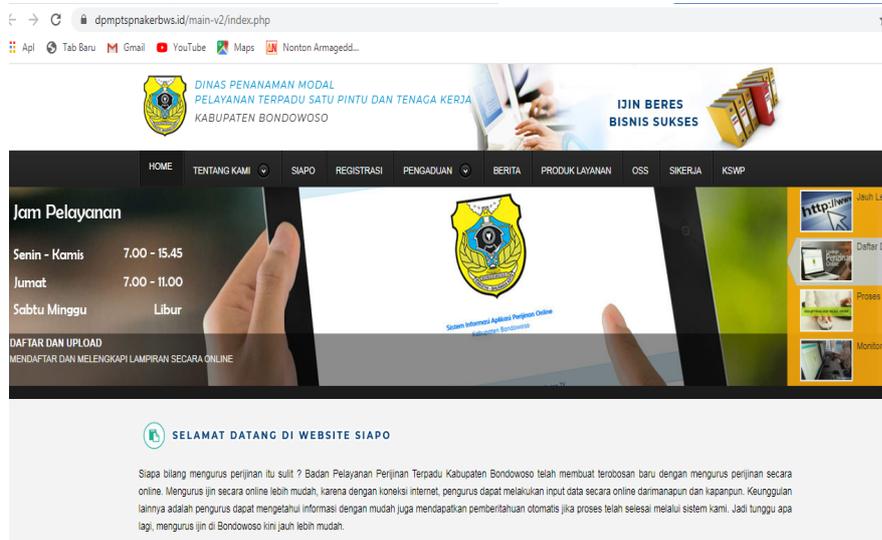
mengelola laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirancang khusus untuk mempermudah pengisian dan penyajian pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Tindak lanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, yang mengatur teknis penyusunan dan penyampaian. SIM LPPD terdiri dari dua menu utama, yaitu: 1) ILPPD Berisi informasi hasil LPPD pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diakses oleh masyarakat dan 2) LPPD Aplikasi untuk mengelola LPPD pada tahun yang sedang berjalan.



Gambar 1.18. SIMDA Perencanaan Kabupaten Bondowoso

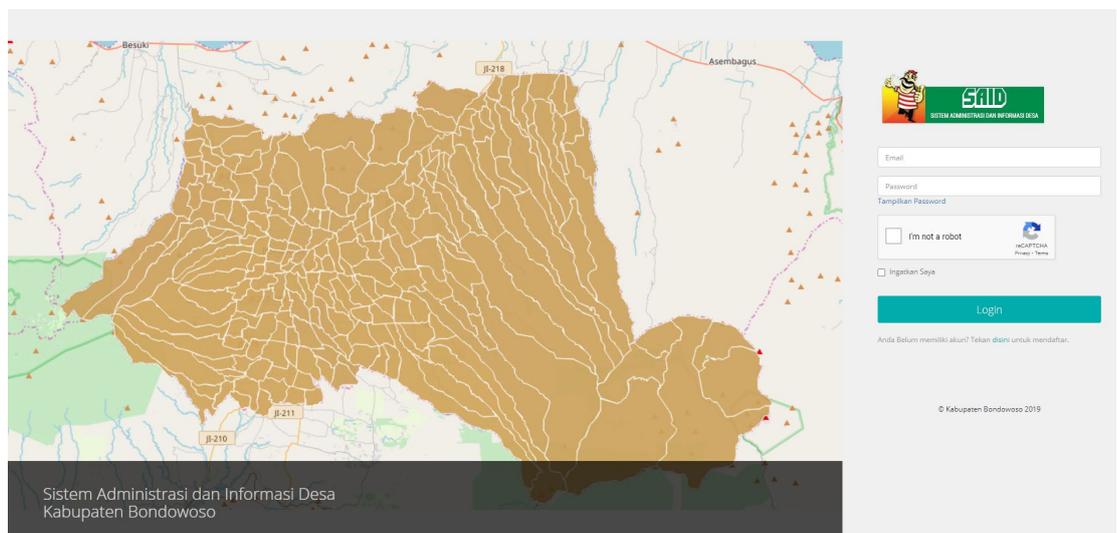
Aplikasi SIMDA Perencanaan (SIPD) adalah sebuah aplikasi penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu e-planning, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu

menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.



Gambar 1.19. SIAPO Kabupaten Bondowoso

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso telah membuat terobosan baru dengan mengurus perijinan secara online. Mengurus ijin secara online lebih mudah, karena dengan koneksi internet, pengurus dapat melakukan input data secara online darimanapun dan kapanpun. Keunggulan lainnya adalah pengurus dapat mengetahui informasi dengan mudah juga mendapatkan pemberitahuan otomatis jika proses telah selesai melalui Sistem Informasi Aplikasi Perijinan Online (SIAPO).



Gambar 1.20. SAID Kabupaten Bondowoso

Guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur telah menyiapkan aplikasi mutakhir bernama Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID), SAID merangkum data kependudukan, data kemiskinan, hingga informasi terupdate yang terjadi di desa.

Berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik membuahkan berbagai bentuk prestasi dan penghargaan. Prestasi dan penghargaan tersebut meliputi berbagai bidang, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Nasional, antara lain :

Tabel 1.14. Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Bondowoso

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Tahun
1	Top 99 Inovasi Pelayanan Kesehatan “Bunda Kespro”	Nasional	2016
2	Pengelola PAUD Terbaik Nomor 2 Nasional	Nasional	2016
3	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2015	Nasional	2016
4	Juara 2 Perpustakaan Sekolah Terbaik	Prov. Jatim	2016
5	Top Pembina BUMD 2016	Nasional	2016
6	Top BUMD 2016	Nasional	2016
7	Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Terbaik	Nasional	2016
8	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2016	Nasional	2017
9	Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Terbaik	Nasional	2017
10	Predikat Kabupaten Layak Anak	Nasional	2017
11	Pelayanan Kepegawaian Terbaik Tipe A	BKN Reg II	2017
12	POSYANDU Terbaik Nasional	Nasional	2017
13	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2016	Nasional	2017
14	APPK Terbaik se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	Prov Jatim	2017
15	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2017	Nasional	2018
16	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2017	Nasional	2018
17	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2018	Nasional	2019
18	Bondowoso Peduli HAM	Nasional	2019
19	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.	Nasional	2019
20	Penghargaan Swasti Saba Sistara	Nasional	2019
21	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2019	Nasional	2020
22	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2019	Nasional	2020
23	SAKIP RB Award 2020	Nasional	2021
24	Raih Nilai SAKIP BB 2020	Nasional	2021
24	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 Kali Berturut-Turut	Prov Jatim	2021

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Tahun
25	Penghargaan Kota Layak Anak Katagori Pratama (KLA)	Nasional	2021
26	Penghargaan Forum Inspirasi Kecamatan Cettar Untuk Jatim Bangkit (Inovasi Sibuba dan Tape Manis)	Prov Jatim	2021
27	Capaian WTP Berturut-Turut tanpa terputus dengan kategori 10 tahun dan 5 tahun terhadap Laporan Keuangan TA 2020	Prov Jatim	2021
28	Penghargaan dalam kategori Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah (DIKPLHD)	Prov Jatim	2021
29	Penghargaan Sekolah Adi-wiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur	Prov Jatim	2021
30	Penghargaan Kategori Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup (PFLH)	Prov Jatim	2021
31	Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2021	Prov Jatim	2021
32	Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Nilai "B"	Nasional	2022
33	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Nilai "BB"	Nasional	2022
34	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 Kali berturut-turut	Nasional	2022
35	Anugrah KPAI Tahun 2022	Nasional	2022
36	Penghargaan Kota Layak Anak " Madya"	Nasional	2022
37	Penganugerahan BKN Award 2022 Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik	Nasional	2022
38	Lencana Bakti Desa Pertama	Nasional	2022
39	Penghargaan Atas Capaian Opini WTP minimal 5X Berturut – turut untuk Laporan Keuangan PEMDA Tahun 2017s/d 2021	Nasional	2022
39	Penghargaan Kabupaten Dengan Pencapaian Imunisasi Tambahan MR(BIAN) Minimal > 95%	Provinsi	2022
40	Penghargaan Sebagai Pelaksanaan Program Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Priode 2015 – 2019	Nasional	2022
41	Terbaik Kedua dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022	Nasional	2022
42	Penghargaan Sebagai Daerah Terbaik Dalam Pengelolaan Wisata Heritage di Jawa Timur	Provinsi	2022
43	Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021	Nasional	2022
44	Penghargaan KabupatenKota Dengan Cakupan Kepala Keluarga Terverifikasi dan Tervalidasi Tertinggi Pada Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2022	Nasional	2022

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi, Tahun 2022



Gambar 1.21. Penghargaan Inovasi Sibuba dan Tape Manis

Inovasi pelayanan warga kurang mampu yaitu Aplikasi Sistem Informasi Ibu dan Bayi (Sibuba) dan gerakan Tanggap Peduli Warga Miskin (Tape Manis). Dua inovasi layanan dasar kesehatan dan penanganan warga miskin ini menghantar kabupaten bondowoso berjuluk kota tape mendapat penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa, tanggal 24 September 2021.

Wakil Bupati bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat menjelaskan penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa, karena bondowoso berhasil menelurkan dan melaksanakan inovasi aplikasi sibuba dan tape manis yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan dan penanganan warga miskin dengan pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan.



Gambar 1.22. Penghargaan Capaian WTP 8 Kali Berturut-Turut tanpa terputus terhadap Laporan Keuangan TA 2022

Pemkab Bondowoso Jawa Timur tujuh kali secara berturut turut mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan. Sertifikat WTP tersebut diberikan Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, di Hotel Bumi, Surabaya, Senin (14/11/2022)

Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang telah bekerja maksimal dalam menyusun laporan dengan baik, hingga meraih penghargaan tersebut. Selain itu, beliau berharap, “penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh Perangkat Daerah menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang dipersyaratkan, meningkatkan pengelolaan keuangan kearah yang lebih baik, transparan dan akuntabel serta dapat dirasakan oleh masyarakat”.

1.7 Profil Sumberdaya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2022 sejumlah 8.761 orang dengan perincian:

- 1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 574 orang;
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 6.819 orang;
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 1.368 orang.

Struktur dan Komposisi ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1. 15
Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	ASN					
		CPNS		PNS		PPPK	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	SD / MI	0	0	55	2	0	0
2	SMP/ MTs	0	0	174	1	0	0
3	SMA / SMK / MA	0	0	1,275	353	14	7
4	Diploma 1 (D-1)	0	0	0	8	0	0
5	Diploma 2 (D-2)	0	0	150	79	0	0
6	Diploma 3 (D-3)	48	187	146	395	3	0
7	Diploma 4 (D-4)	2	6	35	116	0	0
8	Sarjana Srata 1 (S-1)	121	209	1,747	1,970	650	694
9	Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	0	1	212	100	0	0
10	Doktoral (S-3)	0	0	1	0	0	0
JUMLAH		171	403	3.795	3.024	667	701

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

- b. Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

Tabel 1.16

Komposisi Aparatur Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kualifikasi Agama	Jumlah CPNS		Jumlah PNS		Jumlah PPPK		JML
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	167	399	3,765	2,957	664	696	8.648
2	Kristen	2	1	19	46	3	4	75

No	Kualifikasi Agama	Jumlah CPNS		Jumlah PNS		Jumlah PPPK		JML
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
3	Katolik	0	3	6	11	0	1	21
4	Hindu	1	0	5	8	0	0	14
5	Budha	1	0	0	2	0	0	3
Jumlah Per Jenis Kelamin		171	403	3.795	3.024	667	701	8.761
JUMLAH		574		6.819		1.368		8.761

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

c. Berdasarkan Golongan

Tabel 1. 17

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022

NO	GOLONGAN RUANG	ESELON			NON ESELON			PELAKSANA	JUMLAH
		II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL				
					*PEND	*KESH	LAIN		
1	I/c	0	0	0	0	0	0	6	6
2	I/d	0	0	0	0	0	0	96	96
	Gol I (Juru)	0	0	0	0	0	0	102	102
4	II/a	0	0	0	1	0	4	89	94
5	II/b	0	0	0	4	0	20	252	276
6	II/c	0	0	0	12	66	20	422	520
7	II/d	0	0	0	57	53	7	815	932
	Golongan II (Pengatur)	0	0	0	74	119	51	1.578	1.822
8	III/a	0	0	18	276	96	55	567	1.012
9	III/b	0	0	30	536	158	41	264	1.029
10	III/c	0	2	44	581	191	38	63	919
11	III/d	0	38	119	380	222	111	57	927
	Golongan III (Penata)	0	40	211	1.773	667	245	951	3.887
12	IV/a	0	74	9	368	64	32	3	550
13	IV/b	9	44	0	887	38	10	0	988
14	IV/c	19	1	0	10	4	2	1	37
15	IV/d	1	0	0	0	2	0	0	3
	Golongan IV (Pembina)	29	119	9	1.265	108	44	4	1.578
16	Gol IX (PPPK)	0	0	0	0	0	0	1.345	1.345
JUMLAH TOTAL		29	163	220	3.112	894	340	4.003	8.761

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

*PEND = PENDIDIKAN

*KESH = KESEHATAN

Dasar hukum yang mengatur tentang Tentang Honorer yaitu:

- a) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin dan Kesejahteraan Tenaga Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
- b) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 188/37/430.6.2/2021 tentang Perpanjangan Kontrak, Penetapan Honorarium dan Penempatan Tenaga Honorer pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Dasar Hukum diatas, Jumlah tenaga honorer sebanyak 518 orang yang terdiri dari:

- a) Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) sebanyak 58 orang; dan
- b) Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) sebanyak 460 orang.

Namun, sampai akhir tahun 2022 terdapat beberapa tenaga honorer yang meninggal dunia dan pensiun. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 jumlah pegawai honorer sebanyak 373 orang dengan rincian berikut:

Tabel 1. 18
Komposisi Tenaga Honorer Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Non ASN		Jumlah
		Honorer K1	Honorer K2	
1	SD / MI	8	9	17
2	SMP / MTs	3	21	24
3	SMA / SMK / MA	19	200	219
4	Diploma 1 (D-1)	1	1	2
5	Diploma 2 (D-2)	-	39	39
6	Diploma 3 (D-3)	12	3	15
7	Diploma 4 (D-4)	-	-	-
8	Sarjana Srata 1 (S-1)	13	43	56
9	Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	-	1	1
10	Doktoral (S-3)	-	-	-
JUMLAH		56	317	373

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

1.8 Isu Strategis

1. Pertanian

Akibat pandemi covid-19 sektor pertanian menjadi bantalan dalam kontraksi ekonomi dan menjadi limpahan dalam penyerapan tenaga kerja. Terlihat dari meningkatnya tenaga kerja di sektor pertanian secara signifikan. Peningkatan tenaga kerja menjadi tambahan beban sektor pertanian, karena produktifitas tenaga kerja pertanian rendah dan secara struktur pengupahan paling rendah dibanding sektor yang lain. Sehingga diperlukan langkah-langkah peningkatan pembangunan sektor pertanian secara tepat, diantaranya :

- Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian perlu dilakukan lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani karena tingkat efisiensi dalam berusaha tani yang masih rendah.
- Peluang industri pengolahan hasil pertanian sebagai pendorong peningkatan nilai tambah perlu dikembangkan secara lebih optimal.
- Peluang ekspor komoditi unggulan selain kopi sebagai faktor pengungkit untuk tumbuh sebagai penyumbang devisa dan berkembangnya sektor penunjang lainnya perlu dikembangkan lebih optimal.
- Potensi peternakan yang menjadi budaya sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bondowoso bahkan sebagai lumbung ternak di Jawa Timur perlu dikembangkan lebih optimal.

2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Potensi wisata dan budaya di Kabupaten Bondowoso cukup banyak yang dapat dikembangkan menjadi industri pariwisata. Percepatan pengembangan pariwisata menjadi sebuah industri yang melibatkan seluruh masyarakat termasuk peningkatan kualitas SDM pariwisata perlu dilakukan secara lebih fokus, agar dapat menggerakkan lapangan usaha lainnya untuk tumbuh. Lapangan usaha yang berdampak langsung adalah jasa akomodasi, penyediaan makan dan minum, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, perdagangan dan retail, sedangkan yang berdampak tidak langsung yaitu Penyedia barang, jasa marketing, jasa pembersih dan

perawatan, penyedia listrik, katering, produksi makanan, desain dan percetakan, serta berdampak induksi seperti infrastruktur, pertanian, teknologi, perumahan, komunikasi, pendidikan dan kesehatan, harus terus dioptimalkan. Penguatan citra dan daya saing pariwisata secara internasional melalui City Branding Ijen Geopark perlu dipromosikan secara terintegrasi didukung seluruh stake holder dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dukungan pengembangan terhadap 17 subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kriya, TV dan Radio, penerbitan, arsitektur, game, iklan, musik, fotografi, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, film animasi dan video, desain interior dan desain komunikasi visual, harus difasilitasi sebagai salah satu pengungkit pemulihan perekonomian Kabupaten Bondowoso.

3. Investasi

Selama pandemi covid-19 investasi terhambat, ketika tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat, serangan covid-19 gelombang berikutnya berdampak lebih berat, sehingga iklim investasi yang kondusif perlu terus didorong melalui inovasi pelayanan, kemudahan perijinan dan didukung penyediaan tenaga kerja sesuai kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja, serta perlunya promosi investasi secara lebih intensif terhadap potensi ekonomi di Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan minat investor berinvestasi.

4. Koperasi dan UMKM

Berbagai keterbatasan Koperasi dan UMKM diantaranya kualitas SDM dan manajemen pengelolaan usaha, inovasi, kualitas dan kapasitas produksi, akses sumber pembiayaan dan akses pemasaran baik secara digital maupun konvensional perlu difasilitasi dan terus dikembangkan melalui penanganan lintas sektor dalam pemulihan ekonomi, mengingat dampak pandemi covid-19 terhadap Koperasi dan UMKM cukup beragam sehingga penanganannya perlu disesuaikan dengan dampak yang diterima.

5. Perdagangan

Fasilitasi dan ketersediaan sarana prasarana penunjang perdagangan baik secara konvensional maupun non konvensional dalam rangka mendukung

kegiatan ekonomi masyarakat, utamanya menuju era ekonomi digital belum memadai dan masih perlu dilakukan percepatan untuk mendukung pemulihan ekonomi, mengingat pertumbuhan sektor perdagangan cenderung melambat selama 3 (tiga) tahun terakhir dan berkontraksi cukup dalam selama masa pandemi covid-19.

6. Perindustrian

Pengembangan agroindustri, terutama di perdesaan perlu ditingkatkan, terutama untuk produk-produk yang diolah dalam skala kecil. Sementara kendala pengembangan agroindustri diantaranya adalah minimnya infrastruktur untuk mendukung agroindustri seperti jalan dan akses air, kurangnya sarana prasarana peningkatan skala usaha, serta akses permodalan/pembiayaan. Selama pandemi covid-19 sektor industri pengolahan yang berbasis pertanian dapat bertahan dan bahkan meningkat walaupun sangat kecil.

7. Kemiskinan dan pengangguran

Sejalan dengan penurunan kinerja ekonomi, maka berpengaruh juga terhadap kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso yang sempat mengalami penurunan cukup signifikan selama lima tahun terakhir, dengan adanya Pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi, kemampuan berusaha dan akses permodalan. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi dan rumah layak huni. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap meningkatnya pengangguran. Beberapa jenis usaha mengalami penutupan khususnya di sektor jasa yang berkontribusi meningkatkan pengangguran terbuka menjadi relatif cukup besar. Pertumbuhan angkatan kerja baru harus terus menerus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Tingkat kesesuaian ketrampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta akses informasi bagi angkatan kerja terhadap lapangan kerja yang tersedia masih perlu mendapat perhatian, agar dapat bersaing maka informasi pasar kerja harus dapat diperoleh dengan mudah.

8. Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) prioritas di Kabupaten Bondowoso, seperti anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan dan gelandangan psikotik, maupun PMKS lainnya, seperti anak dengan kecacatan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kasus. Minimnya tenaga teknis sosial, tenaga dokter jiwa serta aksesibilitas ke lokasi sasaran PMKS yang belum memadai, data populasi yang belum diverifikasi dan dilakukan validasi secara periodik, merupakan tantangan dan hambatan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dengan terjadinya Pandemi Covid-19 diperlukan dukungan bantuan secara langsung bagi PMKS.

9. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan Infrastruktur daerah mengalami hambatan, karena adanya refocusing dan realokasi anggaran infrastruktur ke penanganan pandemi Covid-19, beberapa ruas jalan strategis masih belum mantap seluruhnya dan belum tersedia rambu yang memadai serta cakupan air bersih belum merata ke seluruh wilayah. Sebagaimana Perpres No. 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, di Bondowoso terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Geopark Ijen, Kawasan Peternakan, Agropolitan, dan lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang memerlukan dukungan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten.

Infrastruktur daerah di Kabupaten Bondowoso belum tersedia secara memadai, seperti jalan dan jembatan, saluran irigasi sekunder dan tersier yang dalam kondisi baik terus menurun, air bersih, sanitasi dan drainase, sarana transportasi, serta akses terhadap jaringan komunikasi. Perlu upaya untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur khususnya dalam rangka menurunkan disparitas desa-kota, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata baik antar tingkat pendapatan maupun antar wilayah.

10. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Bondowoso masih perlu dioptimalkan melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan aksesibilitas dan pengelolaan lingkungan sehingga terbentuk kemandirian desa. Sebagaimana diketahui pemberdayaan masyarakat merupakan nilai strategis dalam proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Optimalisasi fungsi BUMDesa dan BUMDes Bersama sebagai sumber pendapatan Desa, khususnya dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19, sebagai upaya pencapaian Desa Mandiri.

11. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka menciptakan lingkungan sehat, telah dilakukan identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Bondowoso sebagaimana kriteria pada PermenPUPR No.14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat beberapa wilayah yang memerlukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dengan meningkatkan prasarana sarana utilitas umum sesuai dengan kriteria kekumuhannya, seperti drainase, sistem penyediaan air limbah domestik, jalan lingkungan, dan lainnya.

12. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Bondowoso guna menjaga keseimbangan ekosistem. Perubahan fungsi lahan, pencemaran lingkungan oleh industri, pengelolaan persampahan, dampak perubahan iklim (global warming) menjadi fokus permasalahan yang harus diselesaikan.

13. Pelayanan Publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso menjadi tuntutan dan ekspektasi masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi harus segera diwujudkan dan diselesaikan termasuk pemenuhan pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana

penyelenggaraan layanan inklusi pada semua fasilitas pelayanan publik agar menjadi faktor pendorong dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Peningkatan pelayanan publik juga dilaksanakan melalui penataan kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan jabatan fungsional serta penataan SDM, untuk mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan zona integritas.

14. Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Pemuda

Fasilitasi perlindungan ibu dan anak serta pemberdayaan pemuda di Kabupaten Bondowoso masih perlu ditingkatkan. Dipandang perlu adanya upaya lanjutan untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan serta dalam fasilitasi perlindungan yang proporsional kepada ibu dan anak dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bondowoso juga menjadi kendala untuk pencapaian pembangunan PUG. Penguatan Forum Anak dan forum pemuda perlu terus dilakukan pembinaan agar semakin meningkat kualitasnya.

15. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Stabilitas ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat merupakan faktor fundamental yang sangat dibutuhkan sebagai syarat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso. Oleh karenanya diperlukan upaya secara konsisten dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, penegakan perda serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi konflik yang terjadi. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional penegakan perda, serta alat bantu petugas dan mobil

Pemadam Kebakaran juga menjadi kendala dalam percepatan penanganan kejadian kebakaran.

Pada saat pandemi Covid-19, kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan rasa aman masyarakat. Sinergi stakeholder penanggulangan bencana harus terus dilakukan sehingga pandemi Covid-19 dapat diatasi.

16. Pangan dan Gizi Masyarakat

Kabupaten Bondowoso menghadapi beban utama yaitu menurunnya angka kecukupan gizi masyarakat yang menyebabkan meningkatnya prevalensi gizi kurang. Pada saat upaya mengatasi permasalahan ketahanan pangan dan gizi yang berkaitan dengan stunting secara bertahap telah dapat menurunkan prevalensi stunting, saat ini menghadapi krisis baru yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial dapat menurunkan kinerja yang telah dicapai selama ini. Oleh karena itu diperlukan perhatian agar Bondowoso mampu mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's), yang salah satunya menyebutkan pentingnya mengatasi malnutrisi bagi masyarakat, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan berkelanjutan.

1.9 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah singkat Kabupaten Bondowoso, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi, indeks pembangunan manusia, juga profil sumberdaya aparatur, serta sistematika penyajian.

BAB 2 : Perencanaan Kinerja

Memuat rencana strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pencapaian sasaran sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

BAB 3 : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja yang diuraikan per sasaran strategis, serta akuntabilitas anggaran tahun 2019.

BAB 4 : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja tahun 2018, dengan harapan bermanfaat untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA



2.1 Instrumen Pendukung Kinerja

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional, akuntabel dan transparan, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso membangun berbagai infrastruktur aplikasi sistem pendukung kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diterapkan pemerintahan Kabupaten Bondowoso atau yang disebut dengan e-government bertujuan agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Penerapan aplikasi sistem berbasis teknologi informasi tersebut telah digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penggunaan aplikasi sistem secara online selain ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga mendukung terciptanya inovasi pelayanan publik.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

1. Visi dan Misi

Visi adalah pernyataan mengenai keadaan di masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Visi organisasi yang ditetapkan mesti menjadi visi bersama (shared vision) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumberdaya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan tolok ukur keunggulan, dan menjembatani keadaan sekarang dan masa depan

Berdasarkan kondisi obyektif daerah saat ini, maka Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI,
LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN
DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA”**

Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan Dalam Bingkai Iman Dan Takwa adalah kata kunci Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan.

Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan, Dalam Bingkai Iman Dan Takwa yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Bondowoso. Visi pembangunan tahun 2018-2023 mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Secara filosofi, visi pembangunan tahun 2018-2023 dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung pada kata kunci dan pilar misi sebagai berikut:

1. Mandiri Ekonomi

Pilar Pembangunan Kemandirian Ekonomi

Adalah terwujudnya kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk membangun, dan memelihara kelangsungan hidup dengan mengandalkan kemampuan sendiri secara produktif. Membangun kemandirian ekonomi berarti mengembangkan kemampuan untuk proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural dalam mengembangkan seluruh potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki, dengan cara-cara kreatif dan inovatif, untuk meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat untuk kesejahteraan bersama dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah.

2. Lestari

Pilar Pembangunan Lingkungan

Mengandung arti bahwa masyarakat Bondowoso memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula. Sebab telah disadari dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya harus mengurangi perusakan (dampak negative sekecil mungkin) dan mempertahankan keberadaan sumber daya alam tidak terbarukan, tetapi juga memperbaiki sumber daya alam terbarukan, serta mencapai kembali keadaan sesuai kapasitasnya yang semula, sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

3. Sejahtera

Pilar Pembangunan Kesejahteraan

Adalah kondisi masyarakat Bondowoso yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bondowoso, serta tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.

4. Adil dan Terdepan

Pilar Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Mengandung arti adil yang bersifat distributif, yaitu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan. Sehingga akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menciptakan situasi aman, dan tenteram, menghapuskan potensi konflik sosial, taat regulasi dan supremasi hukum, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan kondisi tersebut diharapkan 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu berperan pada posisi terdepan, dalam setiap upaya meraih keunggulan-keunggulan sehingga mampu bersaing dalam segala bidang untuk tercapainya Bondowoso sebagai kawasan agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur.

5. Iman dan Takwa

Pilar Pembangunan Manusia

Adalah kondisi masyarakat Bondowoso dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta derajat kesehatan yang baik, dari semua tingkatan usia, hidup berlandaskan ajaran agama sesuai dengan keyakinan

masing-masing individu, yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 dibangun atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Bondowoso saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2023.

Disamping itu juga memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, serta visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bondowoso tahun 2005 - 2025, yaitu mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur diwarnai dengan nuansa religius melalui sektor pertanian sebagai andalan.

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan, dalam Bingkai Iman Dan Takwa” sebagai berikut:

- 2.3 Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
- 2.4 Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif.
- 2.5 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- 2.6 Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif.
- 2.7 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bondowoso sesuai yang tertuang RPJMD maupun RKPd secara terukur dan terarah, yaitu melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang diawali dengan membangun komitmen pimpinan mulai dari Bupati hingga Kepala Perangkat Daerah dan bersama seluruh jajaran birokrasi untuk benar-benar konsisten menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi perlu ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan untuk memberikan pedoman pembangunan sehingga terdapat keselarasan antara visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kinerja yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang harus dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang diarahkan dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi RPJMD 2018 – 2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan					
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1	Mengembangkan agrobisnis perdesaan, revitalisasi pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi budidaya, penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha, perluasan pertanian organik
				2	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi pengolahan, penguatan kemitraan antara petani dengan pengusaha pengolahan, diversifikasi produk unggulan daerah
				3	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan dengan pelaku/ pengusaha pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi, revitalisasi pasar tradisional
		1.1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	1	Mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan partisipasi usaha lokal perdesaan dalam industri pariwisata, meningkatkan citra kepariwisataan Bondowoso, promosi pemasaran dan pengelolaan obyek wisata secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi
		1.1.3	Meningkatnya Usaha Skala Mikro dan kecil	1	Meningkatkan akses usaha mikro terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan teknologi, meningkatkan daya saing usaha mikro dan koperasi menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”), pengembangan ekonomi pondok pesantren (santripreneur)
1.1.4	Meningkatnya Investasi Daerah	1	Meningkatkan identifikasi potensi dan promosi investasi serta meningkatkan sistem pelayanan untuk mendorong kemudahan berinvestasi		
1.1.5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	1	Percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal		
Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif					

2.1	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	<p>Pengendalian pencemaran air, pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan</p> <p>2 Pengendalian pencemaran udara</p> <p>3 Pengendalian kerusakan lingkungan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</p>	
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan permukiman	<p>1 Pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan permukiman untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari</p>	
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat					
3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3.1.1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Pengendalian Kuantitas Penduduk	
		3.1.2	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	2 Memperluas kesempatan kerja, fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan, meningkatkan produktifitas tenaga kerja	
		3.1.3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	3 Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk kemandirian masyarakat	
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif					
4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	1	Menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, transparansi rekrutmen dalam jabatan dan pengembangan E-Government
				2	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional
				3	Meningkatkan transparansi pengelolaan APBD, meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, Meningkatkan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan program/kegiatan
				4	Meningkatkan mekanisme Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.2	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	4.2.1	Meningkatnya kerukunan antar Suku, Agama, Ras dan antar golongan	1	Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, cendekiawan dan masyarakat, pembinaan karakter, pencegahan serta penanganan konflik sosial dan politik

4.2.2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	1	Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana, meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat yang tertib dan taat terhadap peraturan dan Norma
-------	---	---	--

Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul

5.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	5.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan	1	Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan, peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, kualitas pembelajaran dan penguatan manajemen, serta kualitas pelayanan, penguatan pendidikan karakter, fasilitasi pengembangan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan
		5.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan	1	Pemenuhan hak terhadap pelayanan kesehatan peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, kualitas pelayanan dengan melibatkan masyarakat secara optimal, fasilitasi pengembangan infrastruktur kesehatan tingkat desa dan ponpes serta integrasi jaminan kesehatan
		5.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan pemuda	1	Meningkatkan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan, peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas
				2	Meningkatkan perlindungan anak dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak
				3	Meningkatkan kemandirian pemuda dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak pemuda

Tabel 2.2. Arah Kebijakan RPJMD 2018 – 2023

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.2 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4 Sasaran 3.1.1 Sasaran 3.1.2 Sasaran 3.1.3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat				
Sasaran 1.1.5 Sasaran 2.1.1 Sasaran 2.1.2	Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan				
Sasaran 4.1.1		Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan			
Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4		Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat			
Sasaran 1.1.5 Sasaran 3.1.2 Sasaran 3.1.3 Sasaran 1.1.2 Sasaran 5.1.3		Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pengembangan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat			
Sasaran 5.1.1 Sasaran 5.1.2 Sasaran 5.1.3 Sasaran 5.1.4 Sasaran 5.1.5 Sasaran 4.2.1 Sasaran 4.2.2 Sasaran 3.1.1		Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik			

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.2 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4 Sasaran 1.1.5				Peningkatan nilai tambah produksi Pertanian, Peningkatan nilai tambah produksi Industri Penjualan, Peningkatan nilai tambah Penyelenggaraan Perdagangan, Peningkatan nilai tambah produksi Pariwisata, Peningkatan nilai tambah Koperasi dan Usaha Skala Mikro, Peningkatan Realisasi Penanaman Modal, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat	
Sasaran 2.1.2				Penataan lingkungan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat	
Sasaran 3.1.2 Sasaran 3.1.3				Penurunan tingkat pengangguran masyarakat, serta Penurunan Penduduk Miskin dan Peningkatan Kepedulian Sosial	
Sasaran 4.1.1 Sasaran 4.2.2				Peningkatan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah, Peningkatan Nilai SAKIP, Mempertahankan nilai Opini WTP, Peningkatan Nilai EKPPD, Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	
Sasaran 5.1.1 Sasaran 5.1.2				Peningkatan derajat pendidikan dan budaya masyarakat, serta Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	

2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Untuk merealisasikan arah kebijakan dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sesuai dengan rencana 1 (satu) tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 dengan tema **“Peningkatan inovasi system Pemerintah berbasis Teknologi Informasi, mendorong kemandirian dan Percepatan pemulihan Ekonomi”**.

Sasaran Strategis adalah manfaat yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan pilihan yang ditetapkan dengan indikator kinerja utama berdasarkan strategi dan arah kebijakan. Rumusan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diharapkan, serta merupakan ikhtisar manfaat (benefit) dari pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Rumusan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari 18 (delapan belas) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama.

Sasaran strategis yang diharapkan dapat direalisasikan dalam program prioritas sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, selaras dengan fokus pembangunan di dalam RKP Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2022 dengan tema yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dan juga selaras dengan Penyusunan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dengan tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro”** disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Formula Indikator dan Program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Pertanian (th n)} - \sum \text{PDRB ADHB Sektor Pertanian (th n-1)}}{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Pertanian (n-1)}} \times 100\%$	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Penyuluhan Pertanian	
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	2. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Industri (th n)} - \sum \text{PDRB ADHB Sektor Industri (th n-1)}}{\sum \text{PDRB ADHK Sektor Industri (n-1)}} \times 100\%$	Pengembangan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Pengendalian Izin Usaha Industr Kabupaten/Kota	
	3. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Perdagangan (th n)} - \sum \text{PDRB ADHB Sektor Perdagangan (th n-1)}}{\sum \text{PDRB ADHK Sektor Perdagangan (n-1)}} \times 100\%$	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
Pengembangan Ekspor				
Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4. Persentase Kontribusi PDRB Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Pariwisata (th n)}}{\sum \text{PDRB ADHK (th n)}} \times 100\%$	Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
3. Meningkatnya Usaha Skala Mikro	5. Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	$\frac{\sum \text{UMKM yg Naik Skala Usaha}}{\sum \text{UMKM yang dibina}} \times 100\%$	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
Pengembangan UMKM				
4. Meningkatnya Investasi Daerah	6. Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi (th n)} - \sum \text{Investasi (th n-1)}}{\sum \text{Investasi (th n-1)}} \times 100\%$	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
			Pelayanan Penanaman Modal	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7. Rasio Panjang jalan bai denga jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah Panjang jalan baik}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Penyelenggaraan Jalan	
			Pengembangan Jasa Konstruksi	
	8. Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPCKTR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Penataan Bangunan Gedung	
			Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
6. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	9. Indeks Kualitas Air	Nilai yang membandingkan data kualitas air dengan baku mutu air	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	10. Indeks Kualitas Udara	Nilai yang membandingkan data kualitas udara dengan baku mutu udara	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
	11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai yang membandingkan luas Kawasan lindung budidaya terhadap luas wilayah	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Pengelolaan Persampahan	
7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	12. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	$\frac{\sum \text{Luas Lahan Kumuh}}{\sum \text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Pengembangan Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	13. Laju Pertumbuhan Penduduk	$\frac{\sum \text{Penduduk (th n)} - \sum \text{Penduduk (th n-1)}}{\sum \text{Penduduk (th n-1)}} \times 100\%$	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
9. Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	14. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\sum \text{Pengangguran (th n)}}{\sum \text{Angkatan Kerja (th n)}} \times 100\%$	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
			Penempatan Tenaga Kerja	
			Hubungan Industrial	
10. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	15. Indeks Desa Membangun (IDM)	1/3 X (Indeks Sosial + Indeks Ekonomi + Indeks Lingkungan)	Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Rehabilitasi Sosial	
			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	16. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Pendaftaran Penduduk	Dispenduk-capil
			Pencatatan Sipil	
			Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	17. Nilai SAKIP	Nilai dan predikat hasil evaluasi SAKIP pada tahun ke-n oleh Kementerian PAN-RB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
	18. Nilai Opini BPK	Nilai dan Predikat atas Laporan Keuangan Daerah pada tahun ke-n oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Perekonomian dan Pembangunan Penyelenggaraan Pengawasan	Bagian Perekonomian/Insp ektorat
	19. Nilai EKPPD	Nilai dan Predikat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun ke-n oleh Kementerian Dalam Negeri	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
12. Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	20. Persentase Potensi Konflik SARA Yang Ditangani	$\frac{\sum \text{Potensi konflik SARA yang diselesaikan}}{\sum \text{Potensi konflik SARA (th n)}}$	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Meningkatnya	21. Persentase	$\frac{\% \text{ Desa/Kelurahan Tangguh Bencana} + \% \text{ Bencana yang}}{\text{ x 100}}$	Peningkatan	Satuan Pol PP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
perlindungan terhadap masyarakat	ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	$\frac{\text{Ditangani Tepat Waktu} + \% \text{ Normalisasi Korban Bencana}}{n \text{ (banyaknya faktor)}}$	Ketentraman dan Ketertiban Umum	BPBD
			Penanggulangan Bencana	
14. Meningkatnya derajat pendidikan	22. Indeks Pendidikan	$\frac{1}{2} X (\text{Indeks Rata Lama Sekolah} + \text{Indeks Harapan Lama sekolah}) X 100\%$	Pengelolaan Pendidikan	Dikbud
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dikbud
15. Meningkatnya derajat kesehatan	23. Indeks Kesehatan	Indeks Harapan Hidup X 100%	Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinkes
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
16. Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda	24. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas DSP3AKB
	25. Status Kabupaten Layak Anak	Status Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak		Dinas DSP3AKB
	26. Status Kabupaten Layak Pemuda	Status Kabupaten layak pemuda atas pemenuhan terhadap indikator regulasi, infrastruktur, kelembagaan dan kemandirian pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Disparpora

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja yang disajikan setelah terdapat penyesuaian dengan Perubahan RKPD 2022 dan KU PAPBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	2,83%
		2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	3,15%
		3 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	6,50%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4 Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,22%
3	Meningkatnya Usaha Skala Mikro	5 Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	0,05%
4	Meningkatnya Investasi Daerah	6 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	10%
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7 Rasio Panjang Jalan Baik dengan Jumlah Penduduk	1,20%
		8 Rasio Jaringan Irigasi	0,020
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	9 Indeks Kualitas Air	53,49
		10 Indeks Kualitas Udara	82,96
		11 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,62
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	12 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,33%
8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	13 Laju Pertumbuhan Penduduk	0,30%
9	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	14 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,50%
10	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	15 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7160
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	16 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
		17 Nilai SAKIP	A
		18 Nilai Opini BPK	WTP
		19 Nilai EKPPD	3,226
12	Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	20 Persentase konflik SARA yang ditangani	100%
13	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	21 Persentase ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana	94,52%

14	Meningkatnya Derajat Pendidikan	22 Indeks Pendidikan	55,15
15	Meningkatnya Derajat Kesehatan	23 Indeks Kesehatan	72,81
16	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Pemuda	24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,43
		25 Status Kabupaten Layak Anak	Madya
		26 Status Kabupaten Layak Pemuda	Pratama

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



Komitmen pemerintah daerah terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD.

Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara indikator dan target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, dalam pemerintahan dengan manajemen berbasis kinerja disebutkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, namun harus berbasis kinerja yang berorientasi untuk perbaikan kinerja, dimana sumberdaya aparatur dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapainya, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), maupun dampak (*impact*).

3.1 Sistem Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dimana dalam penarikan kesimpulan terhadap kategori capaian kinerja mengacu skala ordinal dari Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cara pengukuran kinerja diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis dikategorikan sesuai dengan rentang capaian, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Kategori Penilaian Capaian Kinerja

Rentang Capaian	Kategori
Capaian \geq 100%	Memuaskan
$85 \leq$ Capaian $<$ 100	Sangat Berhasil
$70 \leq$ Capaian $<$ 85	Berhasil
$55 \leq$ Capaian $<$ 70	Cukup Berhasil
Capaian $<$ 55	Kurang Berhasil

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Adapun capaian indikator sasaran strategis yang sudah ditetapkan berdasarkan target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN RPJMD TAHUN BERJALAN
Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan							
Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas							
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHK)	3,70%	3,51%	94,86%	Sangat Berhasil	4,00%	88%
	Persentase Pertumbuhan PDRB (ADHB)	4,92%	8,79%	178,66%	Memuaskan	5,05%	174%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHK)	17.465.250	18.441.126	105,59%	Memuaskan	17.742.470	104%
	Nilai PDRB per Kapita (ADHB)	26.790.000	29.308.115	109,40%	Memuaskan	27.490.000	107%
	Indeks Gini	0,29	0,365	74,14%	Berhasil	0,28	70%
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan							
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	2,83%	4,59%	162,19%	Memuaskan	2,97%	155%
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri/Pengolahan	3,15%	12,61%	400,32%	Memuaskan	3,40%	371%
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	6,50%	12,23%	188,15%	Memuaskan	7,00%	175%
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata							
4	Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,22%	1,06%	86,89%	Sangat Berhasil	1,24%	85%
Sasaran 3 : Meningkatnya Usaha Skala Mikro							
5	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	0,05%	0,05%	100,00%	Memuaskan	0,06%	83,33%
Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi Daerah							
6	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	10%	-0,78%	-7,80%	Kurang Berhasil	12,00%	-6,50%
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi							
7	Rasio panjang jalan baik dengan jumlah penduduk	1,2	1,25	104,17%	Memuaskan	1,2	104,17%
8	Rasio Jaringan Irigasi	0,020	0,019	95,00%	Sangat Berhasil	0,02	95,00%
Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif							
Tujuan 2 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,20	68,97	102,63%	Memuaskan	67,48	102,21%
Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan							
9	Indeks Kualitas Air	53,49	55,33	103,44%	Memuaskan	53,59	103,25%
10	Indeks Kualitas Udara	82,96	86,70	104,51%	Memuaskan	83,06	104,38%
11	Indeks Tutupan Lahan	61,62	59,57	96,67%	Sangat Berhasil	62,54	95,25%
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman							

12	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,33%	0,33%	100,00%	Memuaskan	0,00%	99,00%
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat							
Tujuan 3 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan							
	Persentase Tingkat Kemiskinan	13,50%	13,47%	100,22%	Memuaskan	13,00%	96,38%
Sasaran 8 : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk							
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,30%	0,37%	76,67%	Berhasil	0,58%	136,21%
Sasaran 9 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka							
14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,50%	4,32%	27,20%	Kurang Berhasil	1,86%	-32,26%
Sasaran 10 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat							
15	Indeks Desa Membangun	0,7160	0,7251	101,27%	Memuaskan	0,7275	99,67%
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif							
Tujuan 4a : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik							
	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67)	B (65,01)	97%	Sangat Berhasil	78,5	82,82%
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah							
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81,06	101,33%	Memuaskan	80,5	100,70%
17	Nilai SAKIP	A	BB (74,02)	92,53%	Sangat Berhasil	A	92,53%
18	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	100%	Memuaskan	WTP	100%
19	Nilai EKPPD	3,226	3,22	100%	Memuaskan	3,22	100%
Tujuan 4b : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat							
	Persentase Potensi Konflik Sosial yg ditangani	100%	100%	100%	Memuaskan	100%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan							
20	Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	Memuaskan	100%	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat							
21	Persentase Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	94,52%	83,26%	88,09%	Sangat Berhasil	100%	100%
Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul							
Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia							
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67	67,31	100,46%	Memuaskan	67,46	99,78%
Sasaran 14 : Meningkatnya Derajat Pendidikan							
22	Indeks Pendidikan	55,15	57,71	104,64%	Memuaskan	55,3	104,36%
Sasaran 15 : Meningkatnya Derajat Kesehatan							
23	Indeks Kesehatan	72,81	72,75	99,92%	Sangat Berhasil	73,33	99,21%
Sasaran 16 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan pemuda							
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,43	91,10	99,64%	Sangat Berhasil	92,01	99,01%
25	Status Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	100%	Memuaskan	Nindya	85,71%
26	Status Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	-	0%	Kurang Berhasil	Madya	

Sumber : BPS (data diolah), Bondowoso Dalam Angka Tahun 2023

BAB 4

PENUTUP



Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023 dan memberikan gambaran bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 rata-rata telah tercapai sebesar 111,91% atau dengan kategori memuaskan.

Pencapaian target indikator sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 pada umumnya telah dipenuhi sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja dari 5 Misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023 melalui metode rata-rata tertimbang capaian kinerja setiap sasaran strategis, maka diperoleh penilaian kategori tingkat keberhasilan, dengan rincian berikut :

- Misi 1:** Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 140,86% dengan kategori **memuaskan**.
- Misi 2:** Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 101,16% atau kategori **memuaskan**.
- Misi 3:** Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 68,38% dengan kategori **cukup berhasil**.
- Misi 4:** Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 98,51% dengan kategori **sangat berhasil**.
- Misi 5:** Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 80,84% dengan kategori **berhasil**.

Pencapaian target indikator sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 pada umumnya telah dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun sejujurnya masih terdapat capaian sasaran strategis yang belum memenuhi target yang ditetapkan, karena semata-mata ketidaksempurnaan kami sebagai manusia biasa, dan dengan segala kekurangan tersebut tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk lebih baik pada masa yang akan datang.

Bondowoso, 25 Maret 2022



LAMPIRAN



BUPATI BONDOWOSO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

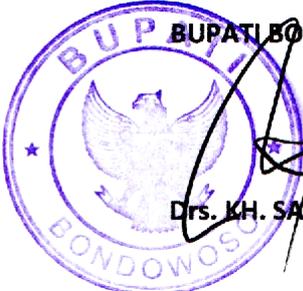
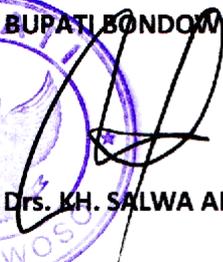
Nama : **Drs. KH. SALWA ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI BONDOWOSO**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bondowoso, 1 Nopember 2022

The stamp is circular and purple. It contains the Garuda Pancasila emblem in the center. The text 'BUPATI BONDOWOSO' is written around the top inner edge, and 'BONDOWOSO' is written around the bottom inner edge. There are two small stars on either side of the emblem.
BUPATI BONDOWOSO

Drs. KH. SALWA ARIFIN

Lampiran : _____

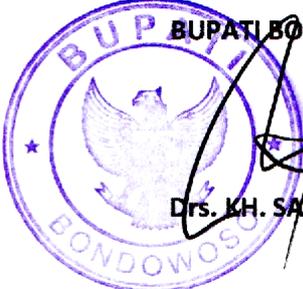
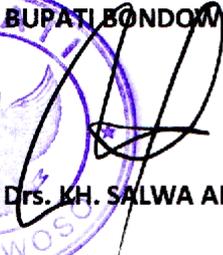
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BUPATI BONDOWOSO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	2,83%
		2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	3,15%
		3 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	6,50%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4 Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,22%
3	Meningkatnya Usaha Skala Mikro	5 Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	0,05%
4	Meningkatnya Investasi Daerah	6 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	10%
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7 Rasio Panjang Jalan Baik dengan Jumlah Penduduk	1,20%
		9 Rasio Jaringan Irigasi	0,020
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	10 Indeks Kualitas Air	53,49
		11 Indeks Kualitas Udara	82,96
		12 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,62
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	13 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,33%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
8	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	14	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,30%
9	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	15	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,50%
10	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	16	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7160
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
		18	Nilai SAKIP	A
		19	Nilai Opini BPK	WTP
		20	Nilai EKPPD	3,226
12	Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	21	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%
13	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	22	Persentase ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana	94,52%
14	Meningkatnya Derajat Pendidikan	23	Indeks Pendidikan	55,15
15	Meningkatnya Derajat Kesehatan	24	Indeks Kesehatan	72,81
16	Meningkatnya Pemberdayaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Pemuda	25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,43
		26	Status Kabupaten Layak Anak	Madya
		27	Status Kabupaten Layak Pemuda	Pratama

Bondowoso, 14 Oktober 2022


BUPATI BONDOWOSO

Drs. KH. SALWA ARIFIN

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BUPATI BONDOWOSO**

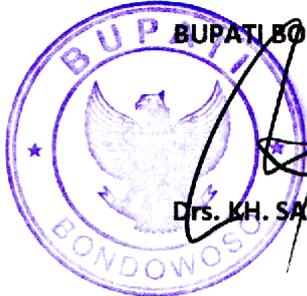
No.	Program	Anggaran
1	Penyuluhan Pertanian	1.795.728.000
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.243.804.225
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.330.000.000
4	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner	5.359.816.500
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0
6	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11.168.865.000
7	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	120.832.400
8	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	35.000.000
9	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.475.000.000
10	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	790.000.000
11	Pengembangan Ekspor	240.000.000
12	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	30.000.000
13	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10.592.923.120
14	Pemasaran Pariwisata	964.090.000
15	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
16	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.089.845.880
17	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75.000.000
18	Promosi Penanaman Modal	-
19	Pelayanan Penanaman Modal	136.800.000
20	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000
21	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-

No.	Program	Anggaran
22	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	15.000.000
23	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10.000.000
24	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404.200.000
25	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	150.000.000
26	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.370.000.000
27	Pengembangan UMKM	10.309.551.400
28	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.786.855.000
29	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.003.345.000
30	Penyelenggaraan Jalan	55.409.620.000
31	Pengembangan Jasa Konstruksi	570.000.000
32	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.499.206.000
33	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.503.313.000
34	Pengembangan Permukiman	6.981.271.000
35	Penataan Bangunan Gedung	965.000.000
36	Penyelenggaraan Penataan Ruang	325.000.000
37	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.870.632.600
38	Perencanaan Lingkungan Hidup	187.314.000
39	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	350.000.000
40	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	540.564.100
41	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengeloan Lingkungan Hidup (PPLH)	217.400.000
42	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100.000.000
43	Pengelolaan Persampahan	5.949.778.400
44	Pengembangan Perumahan	200.000.000

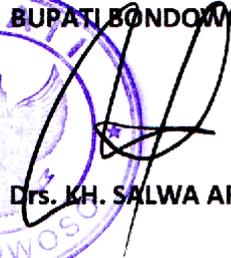
No.	Program	Anggaran
45	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.305.500.000
46	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	8.344.800.000
47	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.918.665.850
48	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	720.198.000
49	Penempatan Tenaga Kerja	1.188.045.000
50	Hubungan Industrial	41.955.000
51	Administrasi Pemerintahan Desa	4.235.969.600
52	Rehabilitasi Sosial	650.684.800
53	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	730.000.000
54	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	628.804.450
55	Penanganan Kerawanan Pangan	304.000.000
56	Pengawasan Keamanan Pangan	0
57	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000
58	Pendaftaran Penduduk	140.521.000
59	Pencatatan Sipil	484.330.000
60	Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.041.039.868
61	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	560.466.048
62	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	750.000.000
63	Perekonomian dan Pembangunan	3.513.163.800
64	Penyelenggaraan Pengawasan	1.971.424.552
65	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	905.000.000
66	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
67	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.202.912.000

No.	Program	Anggaran
68	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.796.830.200
69	Penanggulangan Bencana	15.185.519.300
70	Pengelolaan Pendidikan	14.831.877.743
71	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45.000.000
72	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.879.163.881
73	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	136.822.170.958
74	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.519.800.300
75	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	125.000.000
76	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	773.000.000
77	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.308.594.000
78	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000
	TOTAL	402.424.105.975

Bondowoso, 14 Oktober 2022



BUPATI BONDOWOSO



Drs. KH. SALWA ARIFIN

PENGHARGAAN





GUBERNUR JAWA TIMUR

Hiagam Penghargaan

Nomor : 002.6/17243/031.3/2020

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Memberikan Penghargaan Kepada

SEKARPUTIH PINT@R
(PELAYANAN EFEKTIF TANPA ANTRI)

Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso

Sebagai :

**TOP 30 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KOVABLIK)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020**



Surabaya, 3 November 2020
GUBERNUR JAWA TIMUR



Khofifah Indar Parawansa

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Diagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

ROHAMIN

Sebagai

JUARA I

Tingkat Juru/Mantri Irigasi Kelompok I

**Pada Pemilihan Petugas Operasi & Pemeliharaan
Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional
Tahun 2016**

Jakarta, 3 Desember 2016

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



M. Basuki Hadimuljono



Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Atas Prestasi Dan Keberhasilannya Dalam Mewujudkan Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Wilayah Kabupaten Bondowoso yang Telah Mencapai **96,94 %** Sehingga Kabupaten Bondowoso Berhasil Mencapai Lebih Target Yang Telah Ditetapkan

Jakarta, 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH



Piagam Penghargaan

diberikan kepada :

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

atas prestasinya sebagai

“Instansi Terbaik Pendukung Layanan Klim Otomatis”

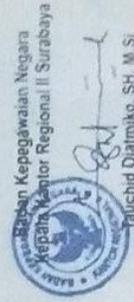
Dalam Implementasi Program SAHABAT LATANRO (Sejahtera Berkat Layanan PT Taspen (Persero))
Pembayaran Tabungan Hari Tua dan Pensiun PT Taspen (Persero) di Wilayah Koordinasi KCU Surabaya
Pada Tahun 2017

Surabaya, 14 Juni 2017

PT Taspen (Persero)
Kepala Kantor Cabang Utama Surabaya



Achmad Mochtarom
Achmad Mochtarom
NIK. 198719671147



Uluchid Djatmiko
Uluchid Djatmiko, SH, M. SI
NIK. 196310261992031001





PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2017

Kepada

Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Kategori

PRATAMA

Pekanbaru, 22 Juli 2017

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Yohana S. Yembise



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Diagam Penghargaan

Diberikan Kepada :

P3A SIDO MAKMUR
PROVINSI JAWA TIMUR

Sebagai

PEMENANG I

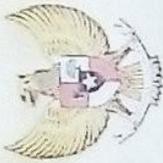
Pada Lomba Operasi & Pemeliharaan Irigasi Partisipatif
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tingkat Nasional
Tahun 2017

Jakarta, 4 Desember 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



M. Basuki Hadimuljono
M. Basuki Hadimuljono



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan :

PENGHARGAAN

Kepada :

Kabupaten Bondowoso

atas prestasinya dalam

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

dengan Predikat Nilai

"BB"

(Sangat Baik)

Jakarta, Januari 2018

ASMAN ABNUR





GUBERNUR JAWA TIMUR

Piagam Penghargaan

Nomor : 065/17488/031.2/2018

Diberikan Kepada :

KBK BEKERJA#

(Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso)

Atas prestasinya dalam Kompetisi Budaya Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
KELOMPOK KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR

TERBAIK 10 (SEPULUH)

Semoga dapat dipertahankan di masa-masa mendatang.

Surabaya, 26 Oktober 2018
GUBERNUR JAWA TIMUR





GUBERNUR JAWA TIMUR

Diagam Penghargaan

Nomor : 002.2/15959/031.3/2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR, MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA

GETAR DESA

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso

SEBAGAI

TOP 25 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

KATEGORI

Kolaborasi Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Surabaya, 4 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

